

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KELAUTAN DA PERIKANAN
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021-2026**

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

Jl. MT. Haryono No. 09 Telanaipura Jambi



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 13 /Kep.Gub/DKP/2023

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Tahun 2005-2005;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026;

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan;

- KETIGA : Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 5 Juni 2023



The image shows a blue circular official stamp of the Governor of Jambi. The text "GUBERNUR JAMBI" is at the top and "Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H" is at the bottom. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 - 2026

**NARASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang memuat Visi, Misi dan Program Pembangunan Provinsi Jambi dimana terdapat perubahan indikator program/kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana dalam Kepmen ini telah ditentukan Indikator pada sub kegiatan. Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam rangka melaksanakan program/kegiatan kelautan dan perikanan guna menentukan rencana, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran agar dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Jambi, selain itu diharapkan juga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam lingkup sektor kelautan dan perikanan di Provinsi.

Kami menyadari penyusunan ini belum memenuhi harapan akan Rencana Strategis yang sebenarnya, namun kami telah berupaya secara maksimal untuk menyusun sesuai dengan pedoman yang ada. Untuk itu


sumbang saran perbaikan kiranya dapat menyempurnakan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dimasa mendatang.

Semoga Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipergunakan sesuai dengan harapan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi tidak lupa disampaikan kepada seluruh pihak terutama aparaturnya yang terlibat dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026.

Jambi, 06 Juni 2023

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi**



**TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Madya
NIP.19681021 199903 1 002**

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah.....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah	37
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	40
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	40
3.3. Telaahan Renstra Kementerian.....	46
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	54
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	54

IV	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	4.1. Tujuan Perangkat Daerah.....	58
	4.2. Sasaran Perangkat Daerah.....	58
V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1. Strategi.....	59
	5.2. Arah Kebijakan.....	
VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	69
VII	REVIU KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
VIII	PENUTUP	80

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 272 ayat (1), yang berbunyi : Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis berpedoman pada RPJMD dan ayat (2) yang berbunyi : Rencana Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah serta ayat (3) yang berbunyi : Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Kemudian dipertegas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 273 ayat (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan serta pada ayat (2) yang berbunyi : Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Reviu Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan startegi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD).

Permasalahan Ekonomi dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Bidang Kelautan dan Perikanan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi antara lain : Masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka kemiskinan nelayan, Menyempitnya areal wilayah tangkapan yang dikuasai nelayan tradisional, Masih rendahnya kualitas SDM nelayan dan penguasaan teknologi, Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan dibandingkan potensi lestarnya, Tingginya tingkat kerusakan dari hasil produksi perikanan, karena belum tersedianya *coldstorage* untuk penyimpanan dan angkutan perikanan tersebut ke daerah pemasaran. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan, seperti armada penangkapan, *cold storage*, jenis alat tangkap. Aplikasi teknologi budidaya ikan belum merata, sehingga produksi budidaya belum memenuhi standar ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas, Pengembangan usaha budidaya sebagian masih berpecah, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan, Terbatasnya tenaga penyuluh perikanan, khususnya tenaga pendamping teknologi yang berada di lapangan.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai Tugas sebagai berikut : Membantu Gubernur Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Perbantuan yang Ditugaskan Kepada Daerah Provinsi Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

Tugas tersebut dituangkan kedalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan pejabat dan staf yang mempunyai waktu dan kemampuan teknis yang cukup serta menguasai substansi fungsi dan tugas Perangkat Daerah.

2. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra.
3. Penyusunan agenda kerja tim Renstra Perangkat Daerah disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran Kepala Daerah hingga verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagai bahan musrenbang.
4. Pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Renstra antara lain : Peraturan perundang-undangan yang terkait, Kebijakan pemerintah yang terkait, Dokumen-dokumen (RPJMD provinsi, RTRW provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD provinsi; RPJMD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJMD provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota; Hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah periode lalu), Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.
5. Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah
6. Penyajian Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Reviu Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi disusun mengacu RPJMD Provinsi Jambi 2021 – 2026 yang telah dibuat secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan stakeholder pembangunan lainnya.

Dari beberapa Misi yang tertuang dalam “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT Tahun 2026”, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai keterkaitan pada Misi ke 2 (dua) yaitu Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan yaitu meningkatkan (1). Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan peningkatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat pesisir

dan pulau-pulau kecil, pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. (2). Meningkatkan Produksi Perikanan melalui pengelolaan perikanan tangkap dan pengelolaan perikanan budidaya. (3). Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan melalui peningkatan pengawasan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan dan di laut. (4). Peningkatan Daya Saing Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan daerah melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi di bidang kelautan dan perikanan, penumbuhan unit-unit pengolahan.

Dalam mendukung usaha tersebut maka arah pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk Tahun 2021-2026 dituangkan dalam Reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi untuk Tahun 2021-2026 serta mendukung Jambi MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 didasarkan dan berpedoman kepada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025.
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5998 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tanggal 10 Desember 2008.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005–2025.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Reviu Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang rencana program/kegiatan lima tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi termasuk arah sasaran strategis dan arah kebijakan serta tolak ukur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi sesuai dengan hasil kajian Kemenpan RB.

Tujuan Penyusunan Reviu Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 adalah agar terciptanya

keterpaduan/keselarasan perencanaan pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan yang akuntabel dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan Provinsi Jambi dan Nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

IV. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Tujuan Perangkat Daerah
- 4.2 Sasaran Perangkat Daerah

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VIII. PENUTUP

BAB. II.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas pokok dan fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Pada pasal 3 berbunyi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, pengelolaan ruang laut dan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengembangan teknologi perikanan, pengawasan dan penguatan daya saing produk;
5. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

6. Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menjalankan tugas dan pokok dan fungsi tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dilengkapi dengan 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang serta 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang membawahi sub bagian/seksi yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing.

1. Sekretaris Dinas, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu pada subbag umum, keuangan, aset, kepegawaian, program dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - Pengelolaan fungsi kesekretariatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi serta pelaksanaan pada Subbagian umum, keuangan dan aset;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas terpadu, pelayanan administrasi serta pelaksanaan pada Subbagian kepegawaian, program dan pelaporan;
 - Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan pengelolaan ruang laut,

pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap, produksi dan usaha dan pengendalian sumberdaya ikan serta menggali potensi sumberdaya laut serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan ruang laut dan perikanan tangkap;
- Perencanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis data perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut;
- Pengkajian dan penerapan teknologi perikanan tangkap;
- Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- Perumusan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian kelayakan usaha;
- Perencanaan dan pengendalian sumberdaya ikan, melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah perairan kewenangan Provinsi;
- Pengaturan batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan Provinsi dan pengelolaan ruang laut;
- Penyerasian dan pengharmonisan pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan, pengembangan, pembinaan sarana, perikanan budidaya, produksi dan usaha budidaya, perbenihan, pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan serta penguatan produksi pakan dan pengembangan teknologi perikanan budidaya yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis bagi pelaku pembudidayaan ikan;
- Penguatan dan peningkatan produksi pakan dengan menginventarisasi, identifikasi dan analisis data budidaya ikan;
- Pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan;

- Perumusan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian kelayakan usaha budidaya ikan;
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan dan (sumberdaya manusia) SDM bidang perikanan budidaya;
 - Pengkoordinasi, rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
 - Pertimbangan teknis dan rekomendasi perizinan bagi pelaku pembudidaya ikan;
 - Pengembangan teknologi perikanan budidaya;
 - Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan, pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan serta pemasaran sumberdaya kelautan dan perikanan yang mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Perencanaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengawasan, pelestarian ekosistem perairan dan penataan sumberdaya kelautan;
 - Penegakan peraturan perundang-undangan dan hukum terkait dengan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - Perumusan kebijakan teknis terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta produk hasil perikanan;
 - Pembinaan bagi pelaku pengolahan hasil perikanan guna meningkatkan mutu dan kualitas produk serta pemasarannya;
 - Perumusan kebijakan teknis tentang penataan dan pelestarian ekosistem perairan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi terdiri atas :

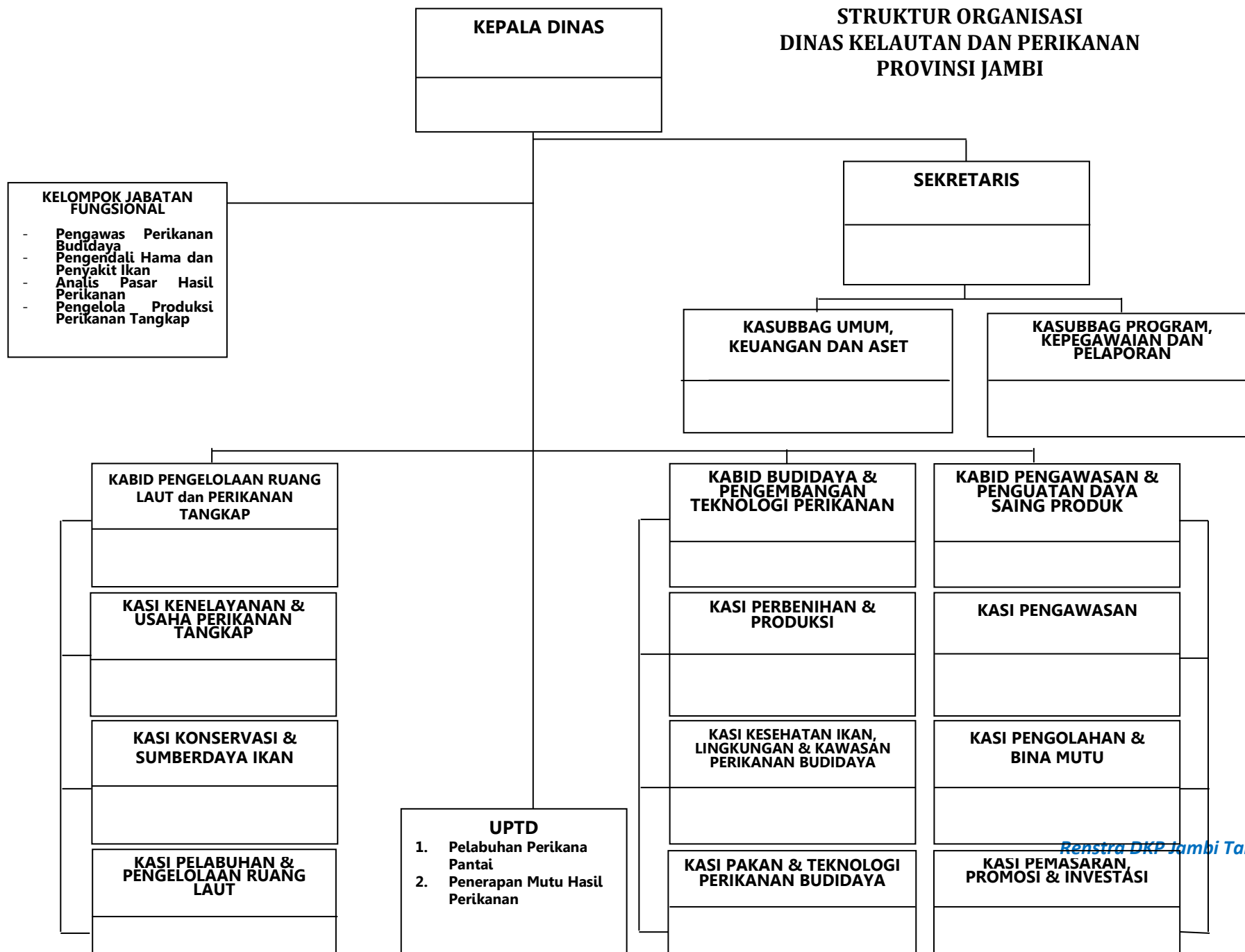
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi Perikanan
4. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Tangkap
5. Kepala Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh satu orang Sekretaris dan tiga orang Kepala Bidang dan dua Orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sekretaris, membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset
 - Kepala Sub Bagian Program, Kepegawaian dan Pelaporan

- b. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi Perikanan, membawahi :
 - Kepala Seksi Perbenihan dan Produksi
 - Kepala Seksi Kesehatan Ikan, Lingkungan dan Kawasan Perikanan Budidaya
 - Kepala Seksi Pakan dan Teknologi Perikanan
- c. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Tangkap, membawahi :
 - Kepala Seksi Kenelayanan dan Usaha Perikanan Tangkap
 - Kepala Seksi Konservasi dan Sumberdaya Ikan
 - Kepala Seksi Pelabuhan dan Pengelolaan Ruang Laut
- d. Kepala Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk, membawahi :
 - Kepala Seksi Pengawasan
 - Kepala Seksi Pengolahan dan Bina Mutu
 - Kepala Seksi Pemasaran, Promosi dan Investasi
- e. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal
 - Kepala Subbag Tata Usaha
 - Kepala Seksi Kesyahbandaran
 - Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan
- f. Kepala UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP), membawahi :
 - Kepala Subbag Tata usaha
 - Kepala Seksi Penerapan Mutu
 - Kepala Seksi Usaha Perikanan

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAMBI**



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai SDM sebanyak 313 orang pegawai yang terdiri atas :

1. Pejabat Struktural 24 orang
2. Pelaksana (Staf) 125 orang
3. Tenaga Honorer Kontrak 163 orang

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Pada Triwulan III Tahun 2021 jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi 312 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 149, dan pegawai honorer 163 orang yang tersebar di kantor, instalasi dan UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai serta Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP), secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1a. Jumlah PNS berdasarkan golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2021.

GOLONGAN	PENDIDIKAN							JUMLAH
	S-2	S-1	D-4	D-3	SLTA	SLTP	SD	
I. A	-	-	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-	-	1	1
D	-	-	-	-	-	-	-	-
II. A	-	-	-	-	1	-	-	1
B	-	-	-	-	3	-	-	3
C	-	-	-	-	8	-	-	8
D	-	-	-	1	7	-	-	8
III. A	-	22	-	2	1	-	-	15
B	-	21	-	1	7	-	-	29
C	-	21	5	3	-	-	-	29
D	4	26	4	-	-	-	-	34
IV. A	9	3	-	-	-	-	-	12
B	3	4	1	-	-	-	-	8
C	-	1	-	-	-	-	-	1
D	-	-	-	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	16	88	10	7	27	0	1	149
HONORER								163
JUMLAH TOTAL (PNS + HONORER)								300

Berdasarkan Tabel 2.1a. di atas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi.

Tabel 2.1b. Reviu Jumlah PNS berdasarkan golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2022.

GOLONGAN	PENDIDIKAN							JUMLAH
	S-2	S-1	D-4	D-3	SLTA	SLTP	SD	
I. A	-	-	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-	-	1	1
D	-	-	-	-	-	-	-	-
II. A	-	-	-	-	1	-	-	1
B	-	-	-	-	3	-	-	3
C	-	-	-	-	8	-	-	8
D	-	-	-	1	7	-	-	8
III. A	-	22	-	2	1	-	-	15
B	-	21	-	1	7	-	-	29
C	-	21	5	3	-	-	-	29
D	4	26	4	-	-	-	-	34
IV. A	9	3	-	-	-	-	-	12
B	3	4	1	-	-	-	-	8
C	-	1	-	-	-	-	-	1
D	-	-	-	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	16	88	10	7	27	0	1	149
HONORER								163
JUMLAH TOTAL (PNS + HONORER)								300

Berdasarkan Tabel 2.1b. di atas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi.

Fasilitas kerja yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi sarana mobilitas, bangunan dan peralatan kantor, sebagai berikut :

- a. Sarana mobilitas terdiri dari :
 - + Kendaraan Roda 6 : 3 unit
 - + Kendaraan Roda 4 : 27 unit (3 Rusak Berat)
 - + Kendaraan Roda 3 : 5 unit
 - + Kendaraan Roda 2 : 57 unit
 - + Exavator : 3 unit (2 Rusak Berat)
- b. Sarana Bagunan terdiri dari :
 - + Bangunan perkantoran/mess, gudang : 169 unit
 - + Rumah Dinas : 1 unit
 - + Musholla : 2 unit
- c. Peralatan Kantor terdiri dari :
 - + Komputer : 70 unit
 - + Laptop : 36 unit
 - + Mesin Tik : -
 - + Note Book : 3 unit
- d. Perpustakaan Dinas : 1 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perkembangan di bidang kelautan dan perikanan selama 5 (lima) tahun tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2016 s/d 2020 dan Tabel. 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2016 s/d 2020 berikut ini :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2016 s/d 2020

Satuan Rp : Juta

No	Program	Indikator Kinerja	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target capaian pada akhir	Target Renstra PD pada tahun ke										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-									
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5	
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1.	Program pengawasan SDKP, konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir terlindungi (%)	Peningkatan kawasan lestari dan terlindungi (%)	22	27	5	4.169	4	4.073	4	4.744	4	5.210	4	5.716	5	2.681	4	5.797	4	4.195	4	2.181			1,00	0,64	1,00	1,42	1,00	0,88	1,00	0,42		
2.	Program pengembangan perikanan budidaya	Produktivitas perikanan budidaya (ton/ha/tahun)	21	27,1	24,8	12.030	25,3	5.737	25,9	2.105	26,5	2.425	27,1	2.745	21,24	6.142	23,54	3.487	24,2	1.344	24,3	799			0,86	0,51	0,93	0,61	0,93	0,64	0,92	0,33		
3.	Program pengembangan perikanan tangkap	Produktivitas perikanan tangkap (ton/alat tangkap/tahun)	13	15,7	14,2	4.230	14,6	4.853	14,9	4.338	15,2	4.896	15,7	5.423	11,9	5.411	12,27	4.415	12,18	3.049	12,4	2.394			0,84	1,28	0,84	0,91	0,82	0,70	0,82	0,49		
4.	Program pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Konsumsi ikan perkapita (kg/kapita/tahun)	34,00	39,00	35,40	2.500	36,00	3.500	37,00	4.566	38,00	5.081	39,00	5.646	37,00	2.057	38,68	2.606	39,15	4.097	39,40	2.281			1,05	0,82	1,07	0,74	1,06	0,90	1,04	0,45		
Rata-rata capaian kinerja (%)																									0,93	0,81	0,96	0,92	0,95	0,78	0,94	0,42		

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2016 s/d 2020

No	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Reaisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Program Pengawasan SDKP, Konservasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir	3.181.827.200	5.166.481.000	6.651.324.520	4.302.564.600	2.194.609.282	3.086.372.384	5.063.151.380	6.518.298.029	4.173.487.662	2.106.824.910	0,05	0,10	0,16	0,18	0,17	0,65	98,66
2.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	10.459.463.800	6.542.356.800	3.581.032.080	1.522.610.000	807.103.056	10.250.274.524	6.411.509.664	3.473.601.117	1.446.479.500	790.960.994	0,48	0,29	1,15	1,03	0,68	0,34	94,92
3.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	5.497.178.500	10.930.645.100	4.578.392.100	3.737.735.300	2.490.232.842	5.387.234.930	10.712.032.198	4.441.040.337	3.588.225.888	2.415.525.856	0,51	0,45	0,36	0,58	0,14	0,53	97,65
4.	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.632.770.100	2.245.785.550	2.699.958.200	4.236.877.300	2.507.333.531	2.553.786.997	2.178.411.983	2.564.960.290	4.109.770.981	2.432.113.525	0,37	0,69	2,92	2,92	2,62	0,74	99,81

Dari penyajian Tabel 2.2 diatas dapat dilihat, bahwa selama 5 (lima) tahun tersebut pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui program dan kegiatan yang ada terus mengalami peningkatan, tetapi belum secara signifikan rasio capaian tiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor penghambat, baik dari internal maupun eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan secara menyeluruh, seperti masih terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia dan kelembagaan kelautan dan perikanan dalam pemanfaatan potensi yang ada, masih sulitnya mengakses sumber permodalan bagi nelayan/pembudidaya ikan, masih rendahnya minat investor di sektor kelautan dan perikanan, masih tingginya biaya produksi ikan akibat mahalnya harga pakan, sehingga berpengaruh terhadap nilai tukar petani, masih terbatasnya dukungan lintas sektor.

Sedangkan pada Tabel 2.3 diatas diketahui bahwa dukungan anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi terus mengalami kenaikan, akan tetapi juga belum secara signifikan. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap pelayanan, dikarenakan program dan kegiatan yang telah direncanakan selama 5 (lima) tahun tidak terealisasi secara menyeluruh.

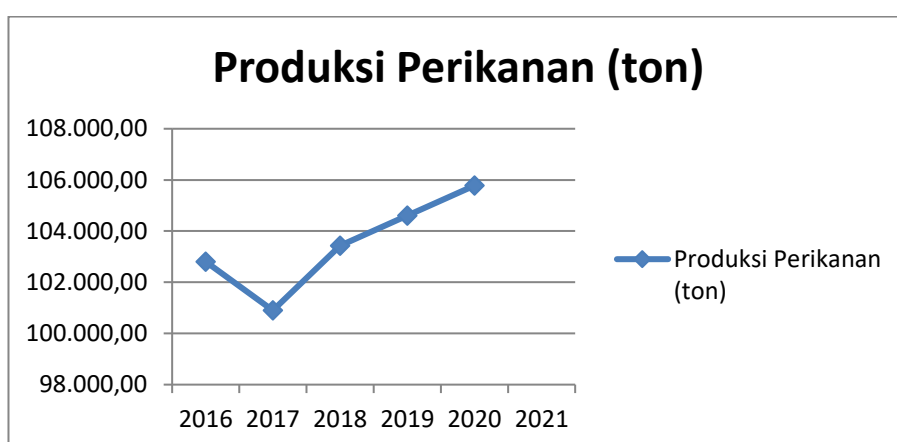
2.3.1 Perkembangan Produksi Perikanan

Selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan 2020, perkembangan produksi perikanan di Provinsi Jambi yang berasal dari produksi perikanan tangkap dan budidaya. Produksi perikanan tangkap berasal dari penangkapan ikan di laut dan perairan umum, sedangkan produksi perikanan budidaya berasal dari kegiatan budidaya ikan di kolam, KJA, tambak dan minapadi, perkembangan produksi perikanan kami sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4. Perkembangan Produksi Perikanan tahun 2016 – 2020

Indikator	Capaian					Rata-rata Perkembangan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Produksi Perikanan (ton)	102.808,1	100.899	103.430,3	104.604,2	105.778,1	0,73

Grafik 2.1. Perkembangan Produksi Perikanan tahun 2016 – 2020



Dari tabel diatas terlihat produksi perikanan pada tahun 2016 sebesar 102.808,1 ton, angka ini terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 105.778,1 ton namun di tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 100.899 ton. Secara keseluruhan produksi perikanan rata-rata meningkat sebesar 0,73% pertahun. Peningkatan ini signifikan terhadap program dan kegiatan yang dilakukan pada kurun waktu 2016 hingga 2020. Peningkatan produksi perikanan ini berasal dari hasil produksi penangkapan di laut dan perairan umum. Peningkatan produksi ini didukung oleh program pengembangan perikanan tangkap yang salah satu diantaranya telah beroperasinya armada penangkapan ikan kapasitas 30 GT sehingga wilayah operasi penangkapannya lebih luas serta adanya bantuan alat penangkapan ikan bagi nelayan. Disamping itu adanya restocking (pemacuan stock) ikan di perairan umum. Sedangkan produksi budidaya dihasilkan dari usaha budidaya kolam, keramba, KJA, tambak dan minapadi. Turunnya produksi perikanan di tahun

2017 ini sebagai dampak kemarau panjang yang melanda Provinsi Jambi, sehingga banyak lahan/kolam masyarakat yang kering dan menurunnya kualitas air. Di samping itu juga, pada aktifitas penangkapan ikan terganggu akibat kabut asap yang pekat, sehingga mengganggu jarak pandang nelayan dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut dan perairan umum.

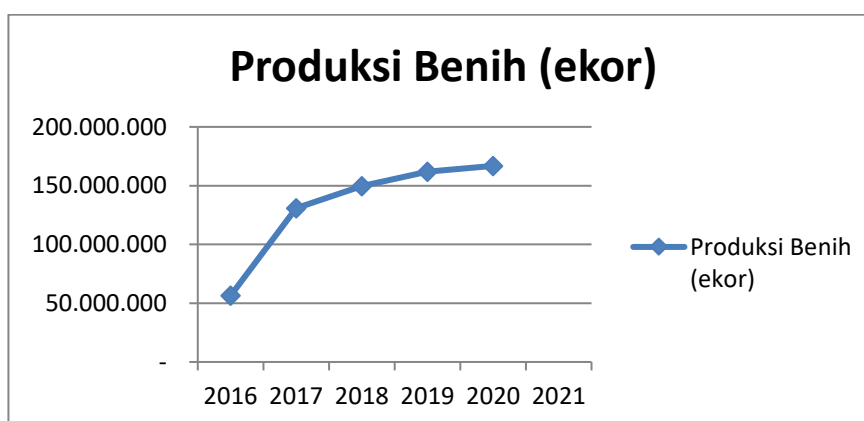
2.3.2 Produksi Benih Ikan

Benih ikan yang diperoleh para pembudidaya ikan di Provinsi Jambi berasal dari Instalasi Pendung Semurup Kerinci, Instalasi Telanaipura, Instalasi Thehok, Balai Benih Ikan Lokal yang ada di tiap kab/kota, Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan BPBAT Sungai Gelam Jambi. Produksi benih di Provinsi Jambi selama tahun 2016-2020 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5. Perkembangan Jumlah produksi benih tahun 2016 – 2020

Indikator	Capaian					Rata-rata Perkembangan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Produksi Benih (ekor)	56.363.359	130.763.680	149.733.955	161.894.000	166.823.000	39,42

Grafik 2.2. Perkembangan Jumlah produksi benih tahun 2016 – 2020.



Pada tabel terlihat produksi benih ikan provinsi Jambi pada tahun 2016 sebesar 56.363.359 ekor dan meningkat hingga tahun 2020 menjadi

166.823.000 ekor. Secara keseluruhan produksi benih ikan rata-rata meningkat sebesar 39,42% pertahun. Kenaikan produksi benih ikan ini sejalan dengan program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Benih ikan yang disebarkan kepada petani ikan di Provinsi Jambi berasal dari Instalasi Pendung Semurup Kerinci, Instalasi Telanaipura, Instalasi Thehok, Balai Benih Ikan Lokal yang ada di tiap kab/kota, Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan BPBAT Sungai Gelam Jambi.

2.3.3 Pembinaan Mutu, Pengolahan dan Pemasaran

Untuk meningkatkan pemasaran produk perikanan agar margin keuntungan dan nilai tambah yang diterima nelayan dan pembudidaya ikan makin meningkat maka pembinaan mutu produk dan pengolahan hasil perikanan di Provinsi Jambi semakin ditingkatkan baik terhadap komoditas ekspor maupun yang dikonsumsi di dalam negeri.

Pembinaan mutu terhadap produk perikanan yang akan diekspor, khususnya dalam rangka memenuhi peraturan bersama Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan sudah dapat berjalan sebagaimana mestinya, mengingat Provinsi Jambi sudah mempunyai laboratorium khusus yakni UPTD PMHP, juga untuk pemasaran lokal dan domestik, pemeriksaan dilaksanakan di laboratorium oleh petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

Pemasaran hasil perikanan merupakan bentuk distribusi normal yang berbasis keseimbangan permintaan dan penawaran (supply and demand) ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi lokal, antar pulau dan ekspor. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal pada saat-saat tertentu Provinsi Jambi masih mendatangkan ikan laut segar dan olahan/ikan asin dari daerah lain. Sementara dalam produksi budidaya dan ikan hias Provinsi Jambi mengirimkan ke luar Provinsi.

Produksi perikanan Jambi yang diekspor pada tahun 2016-2020 adalah ikan hasil tangkapan berupa jenis ikan hias. Ekspor ikan hias ini meliputi ekspor keluar negeri dan domestik yang izin.

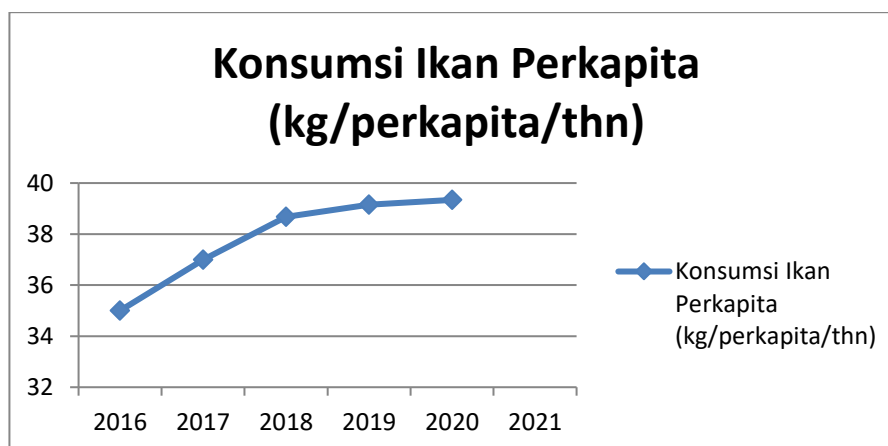
2.3.4 Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi

Tingkat ketersediaan ikan untuk konsumsi penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2016 sekitar 35,00 kg/kapita/tahun, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 39,34 kg/kapita/tahun, berarti mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2.99%.

Tabel 2.6. Perkembangan konsumsi ikan perkapita (kg/kap/thn) tahun 2016 – 2020

Indikator	Capaian					Rata-rata Perkembangan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Konsumsi Ikan Perkapita (kg/perkapita/thn)	35,00	37,00	38,68	39,15	39,34	2,99

Grafik 2.3. Perkembangan konsumsi ikan perkapita (kg/kap/thn) tahun 2016 – 2020



Dari tabel dan grafik terlihat pada tahun 2016 menunjukkan angka 35,00 kg/kapita/tahun, hingga tahun 2020 angka konsumsi ikan perkapita masyarakat provinsi Jambi mencapai 39,34 kg/perkapita/tahun atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 2,99%. Upaya meningkatkan angka konsumsi ikan ini dilakukan melalui Program Peningkatan kesejahteraan petani/nelayan dan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

dengan bermacam kegiatan diantaranya pameran produk perikanan, Kampanye GEMARIKAN, Lomba masak serba ikan, Demonstrasi pengolahan (diversifikasi) produk yang berbahan dasar ikan, penyebaran leaflet, Poster GEMARIKAN dan lain sebagainya.

Untuk memacu peningkatan konsumsi ikan masyarakat Jambi telah terbentuk suatu Forum yang bernama Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Jambi, Forum ini secara signifikan membantu melaksanakan kegiatan Kampanye Gemarikan di Provinsi Jambi. Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota dan bekerjasama dengan FORIKAN dan PKK.

Di Provinsi Jambi lokasi kegiatan sentra pengolahan di Kab. Tanjung Jabung Barat yang terletak di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal. Kegiatan usaha pengolahan di sentra Pengolahan terdiri dari 3 komoditas yaitu : Produk terasi, kerupuk dan ikan kering/ikan asin.

Untuk memacu perkembangan kegiatan pengolahan di Sentra pengolahan hasil perikanan berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi berupa Pembangunan sarana dan prasarana, bantuan peralatan dan bimbingan teknis.

2.3.5 Pembinaan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai

Dalam upaya membina pengembangan usaha nelayan laut dalam berproduksi dan pemasaran hasil perikanan laut, telah dikembangkan berbagai sarana penunjang dalam kawasan Pusat Pendaratan Ikan yang dipusatkan di dua pelabuhan yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal dan Pelabuhan Pendaratan Ikan Nipah Panjang. Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal hingga awal tahun 2018 ditetapkan sebagai UPTD dan mulai operasional dengan kegiatan penyediaan es balok, bongkar muat ikan, pelayanan docking dan lainnya.

2.3.6 Pembinaan Usaha Budidaya/Pembenihan di BBI

Balai benih ikan di Provinsi Jambi terdiri atas BBI Lokal terdapat di seluruh Kabupaten /Kota, yakni BBI Tanah Tumbuh (Kab. Bungo), BBI Muara Limun (Kab. Sarolangun), BBI Simpang Rimbo (Kota Jambi), dan BBI

Tempino (Kab. Ma. Jambi), BBI Talang Kawo (Kab. Merangin), BBI Pembengis (Kab. Tanjung Jabung Barat), BBI Dendang (Kab. Tanjung Jabung Timur), BBI Lokal Talang Kemulun (Kab. Kerinci), BBI Sungai Alai (Kab. Tebo) dan BBI Karneo (Kab. Batanghari).

Selain memproduksi benih, tugas dan fungsi BBI diantaranya memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pembudidaya ikan dalam upaya pengembangan produksi benih ikan, cara yang ditempuh antara lain dengan memberikan bantuan induk serta memberi petunjuk teknis.

2.3.7 Kelembagaan Usaha Perikanan

Perkembangan kelembagaan usaha perikanan seperti koperasi yang bergerak dalam bidang perikanan cukup menggembirakan. Hal ini tercermin dari awal berdirinya koperasi perikanan sampai sekarang sudah terlihat peningkatan usaha dan jumlah anggotanya.

Sampai dengan tahun 2020 jumlah koperasi perikanan tercatat 63 buah, koperasi tersebut berlokasi di Kab. Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi dan Kab. Batanghari, sebagian besar koperasi perikanan bergerak dalam bidang perikanan laut yaitu usaha penangkapan ikan dan budidaya tambak, sebagian kecil bidang usaha pembudidayaan dan pengolahan hasil perikanan.

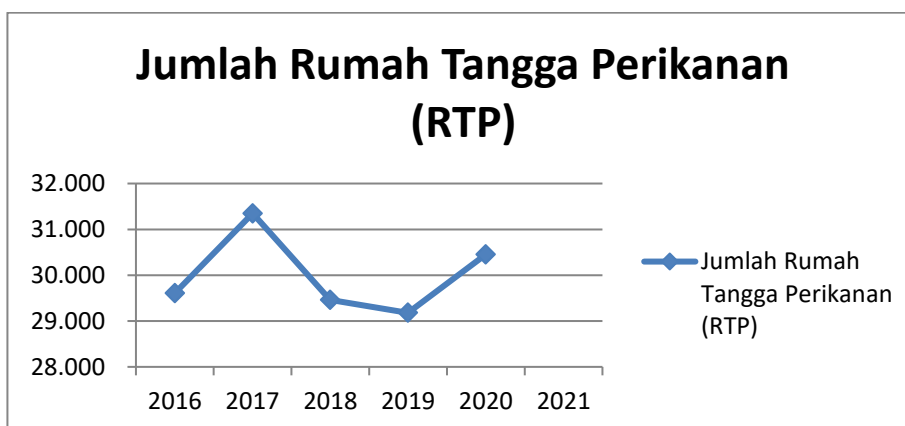
2.3.8 Penyerapan Tenaga Kerja

Secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja sub Sektor Perikanan pada Tahun 2016 hingga Tahun 2020 mengalami penurunan hampir disemua jenis kegiatan. Hal ini tampak sebagai pengaruh krisis global yang mempengaruhi operasional baik di perikanan tangkap maupun budidaya, serta dampak kemarau panjang dan kabut asap sehingga nelayan tidak melaut dan pembudidaya ikan tidak dapat melakukan aktifitas usaha karena dampak kemarau panjang dan kekeringan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7. Perkembangan Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (RTP) tahun 2016 – 2020

Indikator	Capaian					Rata-rata Perkembangan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	29.609	31.349	29.460	29.179	30.452	0,81

Grafik 2.4. Perkembangan Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (RTP) Tahun 2016 – 2020



2.3.9 Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup

2.3.9.1. Restocking/Penebaran Benih Ikan

Kegiatan penebaran kembali benih ikan lokal (*Restocking*) di perairan umum dimaksudkan untuk merehabilitasi sumberdaya perikanan yang kritis dan memulihkan populasi ikan/stock ikan pada perairan.

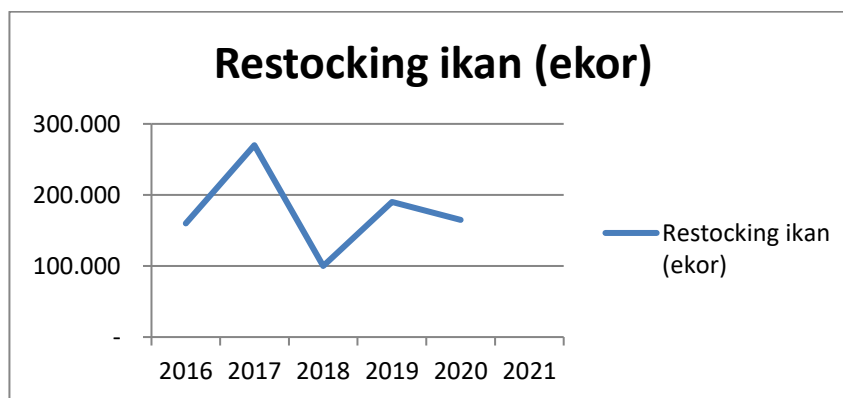
Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan restocking adalah meningkatkan stock populasi ikan di perairan umum dan membantu pengendalian dan keseimbangan ekosistem perairan umum serta meningkatkan produksi ikan di perairan untuk meningkatkan pendapatan dan ketersediaan gizi murah.

Restocking dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penebaran ikan di perairan umum. Selama tahun 2016 hingga 2020 telah dilaksanakan restocking ikan di beberapa lokasi yaitu :

Tabel 2.8. Perkembangan Jumlah Restocking ikan tahun 2016 - 2020

Indikator	Capaian					Rata-rata Perkembangan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Restocking ikan (ekor)	160.000	270.000	100.000	190.000	165.000	20,66

Grafik2. 5. Perkembangan Jumlah Restocking Ikan Tahun 2016 – 2020



Dari Tabel dan grafik terlihat jumlah restocking ikan diperairan umum pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 160.000 dan 270.000 ekor benih ikan, pada tahun 2018 jumlah restocking ikan ini menurun menjadi 100.000 ekor dan pada tahun 2019 kembali meningkat sebanyak 190.000 ekor. Pada tahun 2020 restocking ikan kembali menurun sebanyak 165.000 ekor. Jika dijumlahkan total restocking ikan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 jumlah restocking ikan sebanyak 885.000 ekor. Jumlah restocking ikan ini berfluktuasi, hal ini sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dalam tahun anggaran berjalan. Lokasi restocking ini tersebar di semua suaka dan lubuk larangan yang ada di Provinsi Jambi.

2.3.9.2. Pengembangan Suaka Perikanan (Lubuk Larangan)

Dalam upaya pelestarian sumberdaya perikanan, selain kegiatan restocking juga dilakukan pengembangan suaka perikanan. Penetapan suaka perikanan merupakan keharusan dalam rangka pelestarian sumberdaya ikan di Perairan umum Provinsi Jambi di mana perairannya mendekati kritis. Pembangunan suaka diperlukan dalam upaya menjamin kelangsungan hidup

ikan yang berpengaruh terhadap peningkatan Produksi Perairan. Suaka dibangun/ditetapkan pada zona inti maupun zona penyangga, guna melindungi induk ikan yang akan memijah serta perlindungan terhadap larva dari kelangsungan hidupnya. Perkembangan jumlah suaka perikanan tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9. Perkembangan Jumlah Suaka Perikanan tahun 2016 - 2020

Indikator	Capaian					Rata-rata Perkembangan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Suaka Perikanan (lokasi)	22	22	23	24	25	3,26

Grafik 2.6. Perkembangan Jumlah Suaka Perikanan tahun 2016 – 2020



Dari tabel dan grafik terlihat jumlah suaka perikanan/reservat di Provinsi Jambi pada tahun 2016 sebanyak 22 suaka, dan hingga pada tahun 2020 jumlah suaka perikanan meningkat sebanyak 25 suaka. Penetapan suaka/Reservat ikan merupakan keharusan dalam rangka pelestarian sumber daya alam di Perairan Provinsi Jambi di mana perairannya sudah mendekati kritis. Disamping itu pembangunan reservat juga diperlukan dalam upaya menjamin kelangsungan hidup ikan, juga berpengaruh terhadap peningkatan Produksi suatu Perairan. Reservat dapat dibangun/didirikan pada wilayah

pemijahan ikan (zona inti) maupun wilayah anaknya (zona penyangga), untuk dapat melindungi induk ikan yang akan memijah serta kelangsungan hidup anak-anak ikan.

2.3.9.3. Pengawasan Sumberdaya Perikanan

Pengawasan sumberdaya perikanan di Provinsi Jambi mengacu kepada Undang-undang No. 31 Tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Selama tahun 2016-2020 masih terdapat pelanggaran-pelanggaran antara lain :

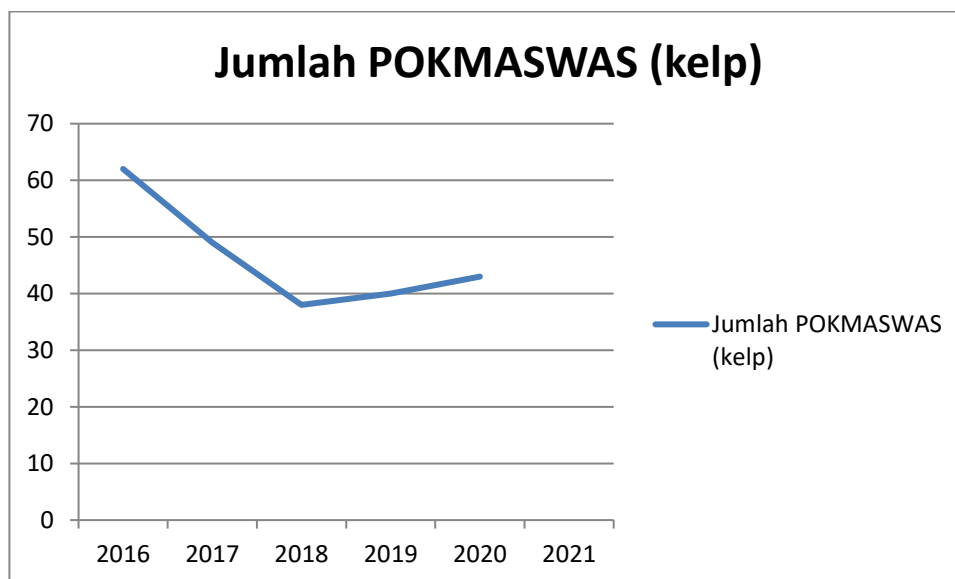
1. Masih adanya nelayan dalam mengoperasikan kapalnya tidak dilengkapi dengan SIUP dan SIPI (Dokumen Kapal)
2. Masih adanya kapal nelayan berukuran > 5 GT yang melanggar jalur penangkapan ikan (beroperasi di jalur I).
3. Masih adanya nelayan/masyarakat yang melakukan penangkapan ikan racun, listrik, tuba dan lain-lain di Perairan Umum Jambi.

Dalam meningkatkan pengawasan dan mengikutsertakan masyarakat perikanan, dibentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan berkembang hingga saat ini. Perkembangan jumlah POKMASWAS tahun 2016 – 2020 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10. Jumlah POKMASWAS Tahun 2016 – 2020

Indikator	Capaian					Rata-rata Perkembangan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah POKMASWAS (kelompok)	62	49	38	40	43	-7,66

Grafik 2.7. Perkembangan Jumlah POKMASWAS tahun 2016 – 2020



Dari tabel dan grafik terlihat jumlah kelompok masyarakat pengawas perikanan pada tahun 2016 sebanyak 62 kelompok, hingga tahun 2018 berkurang menjadi 38 kelompok. Namun, hingga tahun 2020 kembali meningkat menjadi 43 kelompok atau rata-rata perkembangan POKMASWAS sebesar -7,66% pertahun. POKMASWAS ini merupakan kelompok masyarakat yang mengawasi kelestarian SDA khususnya sumber daya ikan di perairan umum dan laut agar terhindar dari pengrusakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga Sumber Daya Ikan akan terus terjaga dan lestari.

2.3.10 Laboratorium Kesling

Sehubungan dengan upaya menekan permasalahan akibat penyakit dan kualitas lingkungan, Provinsi Jambi yang memiliki wilayah pengembangan budidaya KJA di sepanjang aliran sungai dihadapkan pada masalah tersendiri yang harus dikendalikan yaitu terutama kemungkinan adanya pencemaran dari kegiatan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI), limbah pabrik, limbah perkebunan maupun limbah lainnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah melakukan pemantauan, pembinaan dan Pengembangan

Sistem Pengolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang ditunjang dengan sarana Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang mampu berfungsi sebagai unit diagnosa secara optimal sehingga dapat memberikan pelayanan dan rekomendasi dini terhadap kemungkinan munculnya suatu penyakit dan pencemaran serta strategi penanggulangannya yang aman bagi pangan.

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok SKPD telah difungsikan fasilitas-fasilitas yang dimiliki melalui kelembagaan UPTD, yaitu :

2.3.11 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berlokasi di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Fungsi dan peranan PPP kuala Tungkal menunjang peningkatan produksi perikanan, perbaikan kapal dan pengembangan pemasaran hasil perikanan laut maupun hasil olahan.

Dalam upaya membina pengembangan usaha nelayan laut dalam berproduksi dan pemasaran hasil perikanan laut, telah dikembangkan berbagai sarana penunjang dalam kawasan Pelabuhan Perikanan. Di Provinsi Jambi terdapat 3 (tiga) Pelabuhan Perikanan yaitu PPP Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjab Barat serta PPI Nipah Panjang dan PPI Teluk Majelis Kabupaten Tanjab Timur. PPP Kuala Tungkal mulai dibangun kembali tahun 1997 melalui dana APBN murni dan bantuan luar negeri, DAK dan APBD. PPI Nipah Panjang sudah mulai dibangun sejak tahun 2003 dan operasional nya sudah diserahkan ke DKP Provinsi Jambi sejak tahun 2019 sedangkan PPP kuala Tungkal tahun 2011 sudah mulai dapat memberikan pelayanan.

a. Kondisi Fisik

Kondisi tahun 2010 kondisi fisik PPP Kuala Tungkal sudah bisa beroperasi, sekalipun prasarana jalan menuju lokasi PPI Kuala Tungkal belum sempurna. Keadaan Sarana fisik PPP tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11. Keadaan sarana fisik Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal

Sarana yang ada	Keadaan Sarana			
	Baik	Berfungsi	Baik tak Berfungsi	Rusak berat tak Berfungsi
Dermaga	V	v	-	-
Trestel	V	v	-	-
Tempat Pelelangan	V	v	-	-
Gedung serba guna	V	v	-	-
Tp. penjemuran ikan	V	v	-	-
Ruang prtemuan	V	v	-	-
Kios nelayan	V	v	-	-
Gedung Wasdi	V	v	-	-
Mushola	V	v	-	-
Bengkel	V	v	-	-
Mes Karyawan	V	v	-	-
Toilet	V	v	-	-
Gudang Air Bersih	V	v	-	-
Pabrik Es	V	v	-	-
Pos penjagaan	V	v	-	-
Doking Kapal/Slipway	V	v	-	-
Kantor	V	v	-	-
Genset	V	v	-	-
Sumur Bor	V	v	-	-

b. Fungsi dan operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pabrik es

Pabrik es dengan kapasitas 400 es balok per hari, telah berproduksi maksimal dengan harga es lebih murah, dengan sasaran membantu masyarakat nelayan dalam usahanya.

2. Sumur Bor

Sumur ini mampu menghasilkan air bersih dalam jumlah besar untuk dimanfaatkan oleh nelayan.

3. Fasilitas Labuh Sandar Kapal

Fasilitas ini sudah dapat dimanfaatkan dalam bongkar ikan hasil tangkapan nelayan.

4. Aula pertemuan

Fasilitas dengan kapasitas sekitar 80 orang ini telah berfungsi sebagai tempat pertemuan nelayan, wanita nelayan dan pelatihan.

5. Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN)

Fasilitas ini sudah mampu mendistribusikan BBM dengan harga wajar langsung kepada nelayan

6. Lantai Jemur

Fasilitas ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan untuk menjemur ikan olahan hasil tangkapan, khususnya udang popay dengan kapasitas sekitar 300 – 1.000 kg/hari

7. Waserda

Sudah berfungsi dalam memberikan pelayanan pengadaan bahan-bahan untuk melaut.

8. Prasarana PSDKP digunakan sebagai Kantor Satker Ditjen PSDK Kementerian Kelautan dan Perikanan

9. Doking Kapal/Slipway

Secara rutin sudah dapat melayani kapal nelayan yang ingin memperbaiki kapalnya.

10. Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi

UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai daerah kerja di pangkalan-pangkalan pendaratan ikan (PPI) dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun Struktur Organisasi UPTD – Pelabuhan Perikanan Pantai ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jambi No. 32 Tahun 2018 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal.

2.3.12 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)

Dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan kualitas usaha kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi, UPTD PMHP memegang peran penting terutama di dalam penerapan mutu, pengujian dan penerbitan hasil uji mutu produk hasil perikanan.

Peranan dan fungsi UPTD PMHP antara lain adalah :

- Pelaksanaan kebijakan pelayanan mutu dan keamanan produk hasil perikanan,
- Pelaksanaan kebijakan verifikasi persyaratan teknis Sertifikat Kelayakan Pengolah (SKP), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar ekspor produk hasil perikanan,
- Pelaksanaan kebijakan pengujian mutu produk hasil perikanan,
- Pelaksanaan kebijakan hasil pengujian mutu produk hasil perikanan,
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 - 2021 terdapat hambatan dan permasalahan yang secara langsung tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan namun secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian kinerja. Hambatan dan kendala tersebut antara lain:

1. Tingkat pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan masih rendah.
2. Tingginya sifat ketergantungan produk perikanan terhadap cuaca, seperti bencana asap dan musim kemarau panjang yang mengakibatkan keringnya kolam masyarakat sehingga tidak dapat melakukan aktifitas pembudidayaan ikan, serta jarak pandang yang mengganggu nelayan dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut dan perairan umum.
3. Pemilikan sarana penangkapan ikan nelayan hampir 80% sarana penangkapan ikan tradisional dengan ukuran kapal < 5 GT.

4. Keterampilan pembudidaya dan nelayan belum memadai sehingga produktifitas usaha masih rendah.
5. Sebagian pembudidaya ikan dan nelayan kurang disiplin dalam menerapkan teknologi anjuran dan belum melaksanakan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dengan benar sehingga berpengaruh terhadap hasil produksi perikanan yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan hasil usaha belum maksimal.
6. Tingginya biaya produksi ikan akibat mahalnya harga pakan yang didatangkan dari luar daerah, sehingga berpengaruh terhadap nilai tukar pembudidaya ikan.
7. Belum adanya Asosiasi yang dapat memfasilitasi perdagangan langsung untuk negara tujuan ekspor (ekspor ikan hias dan udang hidup masih melalui Jakarta)
8. Masih terbatasnya dukungan lintas sektor untuk jalan produksi, saluran irigasi, energi listrik (PLN) di kawasan unit pengolahan ikan.
9. Masih adanya aktifitas penambangan emas tanpa izin (PETI) dan industri tidak bertanggung jawab yang dapat merusak lingkungan perairan, sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan produksi.
10. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan dibidang penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak kelestarian sumberdaya ikan.

Berdasarkan uraian diatas, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir masalah adalah antara lain :

1. Meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan, khususnya dengan mengikutsertakan masyarakat melalui Pokmaswas.
2. Mengembangkan pola usaha budidaya dengan pendekatan kawasan, sehingga mudah dalam pembinaan maupun penyiapan sarana pendukungnya.
3. Melakukan rekrutmen tenaga teknis/sarjana kelautan dan perikanan, khususnya untuk tenaga di lapangan serta untuk tenaga pendamping paket yang diberikan langsung kepada nelayan atau pembudidaya ikan.

4. Melaksanakan sosialisasi Cara Budidaya Ikan (CBIB) yang baik dan benar, Cara penangkapan ikan yang baik serta Cara pengolahan .
5. Mengembangkan pola pelatihan dan magang yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung secara bertahap melalui pembiayaan dana APBD, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
7. Menempuh upaya fasilitasi akses sumber modal bagi nelayan/pembudidaya ikan melalui KKMB dan program lainnya.

BAB.III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan terdapat hambatan dan permasalahan yang secara langsung langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dan pencapaian kinerja, permasalahan tersebut antara lain :

1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia, baik tenaga teknis dan tenaga fungsional tertentu yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
2. Masih terbatasnya Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki.
3. Belum optimalnya kerja sama, baik antar daerah maupun kerja sama dengan pihak terkait lainnya.
4. Masih lemahnya koordinasi dengan pihak terkait lainnya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu :

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

- Jambi Maju** : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.
- Jambi Aman** : Terciptanya dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.
- Jambi Nyaman** : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya

iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religious dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

Jambi Profesional: Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 –2026, sebagai berikut:

- 1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
- 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
- 3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik

yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019–2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas
2. Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, agamis dan berkesetaraan gender

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima
3. Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan
4. Menigkatnya industri pengolahan
5. Meningkatnya peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung
6. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar
7. Meningkatnya kualitas lingkungan
8. Menurunnya tingkat pengangguran
9. Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan
10. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
11. Meningkatnya kualitas pendidikan
12. Meningkatnya kesadaran pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya

13. Meningkatnya toleransi intra dan antar agama

14. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam mewujudkan misi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 sebelum reviu terdapat pada Misi ke 2, yaitu Memantapkan Perekonomian Daerah akan tetapi setelah direviu memasukkan misi pertama, yaitu Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang tercantum pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.1a. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur Jambi dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 sebelum Reviu

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD
Terwujudnya JAMBI Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho ALLAH SWT	Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah	Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya pei	Meningkatnya produksi perikanan	Produktivitas perikanan tangkap (ton/alat tangkap/tahun)
						Produktivitas perikanan budidaya (ton/ha/tahun)
			Meningkatnya kualitas lingkungan	Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi
			Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatkan pelaku usaha perikanan	Meningkatnya pelaku usaha perikanan	Jumlah rumah tangga perikanan
			Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Meningkatkan angka konsumsi ikan	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)

Tabel 3.1b. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur Jambi dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 setelah Reviu

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD
Terwujudnya JAMBI Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho ALLAH SWT	Memantapkan Tatakelola Pemerintahan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
						2. Predikat Ajuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)
	Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah	Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal	Meningkatnya produksi perikanan	3. Jumlah produksi perikanan (ton)
						4. Jumlah Kawasan Konservasi Perairan Yang Ditetapkan Pemerintah Pusat
						5. Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan
						6. Peningkatan angka konsumsi ikan Daerah (kg/kapita/tahun)
			Meningkatnya kualitas lingkungan	Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	
			Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Meningkatkan angka konsumsi ikan	Meningkatnya angka konsumsi ikan	

Dari tabel di atas, beberapa hal yang menjadi program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang kebijakannya akan dilaksanakan pada arah dan program pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 sampai dengan kegiatan yang termuat dalam dokumen Reviu Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang terkait langsung dan tidak langsung pada pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya produksi perikanan baik di sektor perikanan budidaya maupun di sektor perikanan tangkap
3. Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
4. Meningkatnya angka konsumsi ikan

Dalam mendukung Program Dumisake yang merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka percepatan pembangunan di daerah, maka Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat mendukung Program Strategis tersebut sesuai dengan sasaran Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, yaitu :

1. Bidang Perikanan Tangkap berupa penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan antara lain : bantuan perahu/kapal perikanan, bantuan alat tangkap.
2. Bidang Perikanan Budidaya berupa penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya berupa : bantuan benih, pakan, cetak kolam, keramba dan mesin pembuat pakan.
3. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berupa : bantuan alat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian, perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

Munculnya kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-undang No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. misinya menyatakan: **Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan**

Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh KKP diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut :

A. Visi

Visi pembangunan kelautan dan perikanan *adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan Yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Yang Berkelanjutan” Untuk Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”.

B. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN

2020 – 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

C. Tujuan

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi :

1. “Peningkatan Daya Saing, Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”, yakni :
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
 - b. Menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”, yakni :
 - a. Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. Meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan system logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - c. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. Meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - e. Optimalnya pengelolaan ruang laut.

3. “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024, terdiri dari :

SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;

SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;

SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;

SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;

SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;

SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;

SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;

SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integrative;

SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, dalam penyusunan Peta Strategi, KKP menggunakan empat perspektif yaitu *stakeholders prespective*, *costumer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Stakeholders Perspective

Sasaran Strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat”, dengan Indikator Kinerja, yaitu Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024.

Costumer Perspective

Sasaran Strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Ekonomi sector kelautan dan perikanan meningkat”, dengan indikator kinerja :

- a. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7,9% pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024;
- b. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 8,00 miliar pada tahun 2024; dan
- c. Konsumsi ikan, dari 56,39 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/tahun pada tahun 2024.

Sasaran Strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja :

- 1) Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman dari $\leq 64\%$ pada tahun 2020 menjadi $\leq 80\%$ pada tahun 2024; dan
- 2) Luas kawasan konservasi perairan, 23,40 juta ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta ha pada tahun 2024.

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat” dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dari 60% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024; dan
- 2) Kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok per tahun selama tahun 2020 – 2024.

Sasaran Strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan”, dengan indikator kinerja, yaitu hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan, dari 5 (lima) hasil riset dari tahun 2020 menjadi 15 (lima belas) hasil riset pada tahun 2024.

Sasaran Strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab”, dengan indikator kinerja :

- 1) WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, dari tiga WPPNRI pada tahun 2020 menjadi sebelas WPPNRI pada tahun 2024;
- 2) Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, dari 24 Rencana Zonasi pada tahun 2020 menjadi dua belas Rencana Zonasi pada tahun 2024 (102 kumulatif Rencana Zonasi tahun 2020-2024); dan
- 3) Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024.

Sasaran Strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah “Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing”, dengan indikator kinerja :

- 1) Produksi perikanan, dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun 2020 menjadi 32,75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024;
- 2) Produksi garam nasional, dari 3 juta pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024;
- 3) Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, dari Rp 2,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 4,2 triliun pada tahun 2024;
- 4) Kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan, dari lima kawasan pada tahun 2020 menjadi lima puluh kawasan pada tahun 2024.

Sasaran Strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah “Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif”, dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing*, dari 54% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
- 2) Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan 93% dari tahun 2020 hingga tahun 2024; dan
- 3) Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan dari 77% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024.

Learning and Growth Perspective (input)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* KKP melalui Sasaran Strategis kesembilan (SS-9) “Tatakelola pemerintahan yang baik” dengan indikator kinerja :

- 1) Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 71 tahun 2020 menjadi 75 pada tahun 2024; dan
- 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

Selanjutnya jika dilihat dari Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mendukung 6 (enam) dari 9 (Sembilan) Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2. Keterkaitan antara Renstra KKP dan Renstra DKP Provinsi Jambi

Tujuan KKP	Tujuan DKP	Sasaran Strategis KKP	Sasaran DKP	Indikator Sasaran DKP
Peningkatan kontribusi sektor KP terhadap perekonomian nasional	Meningkatkan produksi perikanan	SS 1. Kesejahteraan masyarakat KP meningkat	Meningkatnya produksi perikanan	1. Jumlah produksi perikanan (ton)
Peningkatan kelestarian sumber daya KP	Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	SS 6. Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	2. Jumlah Kawasan Konservasi yang Dokelola sevara Berkelanjutan
		SS 8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif		3. Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan
Peningkatan kontribusi sektor KP terhadap perekonomian nasional	Meningkatkan angka konsumsi ikan	SS 2. Ekonomi sektor KP meningkat	Meningkatnya angka konsumsi ikan	5. Nilai Angka Konsumsi ikan (AKI) daerah (kg/kapita/tahun)

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satunya melimpahkan kewenangan wilayah perairan laut dari 0-12 mil yang sebelumnya dikelola oleh Kabupaten/Kota (0-4 mil) kini dikelola oleh Provinsi secara menyeluruh. Oleh sebab itu sangat diperlukan pengawasan yang ketat dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada demi kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada.

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang mengutamakan kelestarian lingkungan dengan melakukan penangkapan di area penangkapan, menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, membudidayakan ikan secara baik dan benar serta mengolah produk perikanan yang berkualitas baik.

Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui program dan kegiatan yang ada terus berusaha membantu nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah produk perikanan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada serta melakukan pengawasan secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir kegiatan kelautan dan perikanan demi kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta demi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah produk perikanan.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi aspek gambaran pelayanan dan kegiatan terkait dengan RPJMD, Renstra K/L, RTRW dan RZWP3K, untuk pencapaiannya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal pada Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa kekuatan dan kelemahan dengan mencermati gambaran pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- *Kekuatan (Strenghts)*

1. Tersedianya sarana dan prasarana di bidang perbenihan dan produksi, instalasi pendung semurup kerinci, instalasi telanaipura, dan instalasi thehok.
2. Tersedianya sarana dan prasarana di bidang pelabuhan, berupa UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Kuala Tungkal, PPI Nipah Panjang dan PPI Teluk Majelis.
3. Tersedianya UPTD Pengujian Mutu Hasil Perikanan (PMHP)
4. Tersedianya regulasi tentang RZWP3K yang terintegrasi dengan RTRW Provinsi Jambi

- *Kelemahan (Weakness)*

1. Belum tersedianya data potensi/pemetaan kawasan budidaya perikanan
2. Masih terbatasnya pelaksanaan sertifikasi kelayakan pengolahan
3. Belum optimalnya penanganan pasca panen, mutu, dan prasarana hasil perikanan.
4. Masih terbatasnya SDM yang kompeten di sektor kelautan dan perikanan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan factor yang dari luar yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pembangunan, berupa peluang dan tantangan dengan mencermati dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun regional, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- *Peluang (Opportunities)*

1. Meningkatnya jumlah hunian hotel di Provinsi Jambi berpengaruh terhadap peningkatan ikan konsumsi.
2. Adanya kebijakan nasional tentang GEMARIKAN, Food Estate.
3. Adanya potensi kearifan lokal terkait komoditi unggulan daerahseperti ikan semah, udang ketak dan ikan arwana.
4. Tersedianya teknologi budidaya ikan dan pengolahan produk perikanan.

- *Ancaman (Threat)*

1. Banyaknya komoditi perikanan yang masuk dari luar daerah.

2. Semakin menurunnya kualitas perairan umum.
3. Masih banyaknya kegiatan illegal fishing di perairan.
4. Masih tingginya biaya produksi di sector pembudidayaan ikan.

Bertitik tolak dari identifikasi sebagaimana tersebut di atas, maka isu strategis yang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan pembangunan dimasa yang akan datang. Untuk itu, isu strategis pembangunan sector kelautan dan perikanan Provinsi Jambi meliputi :

1. Masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap, budidaya serta pengolahan hasil kelautan dan perikanan,
2. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang belum ramah lingkungan,
3. Masih rendahnya produksi dan mutu produk hasil kelautan dan perikanan.

BAB.IV. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah menetapkan Rencana Tujuan dan Sasaran untuk Tahun 2021-2026 yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1. Rencana Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 setelah Reviu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,65	79,85	80,35	81,75	82,00
			2. Prediket Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	75 (BB)	80 (A)	85 (A)	90 (AA)	95 (AA)
2	Meningkatkan produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3. Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	111.648,9	113.804,8	116.021,7	118.300,5	120.643,9
3	Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	4. Jumlah Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	10.687,49 Ha	16.400,53 Ha	11.213,36	5.833,19	5.696,36
			5. Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	60%	65%	70%	75%	77%
4	Meningkatkan angka konsumsi ikan	Meningkatnya angka konsumsi ikan	6. Nilai Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah (Kg/Kapita/Tahun)	40,60	41,00	41,50	42,00	42,50

4.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang akan diimplementasikan dalam tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal,
3. Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan,
4. Meningkatkan angka konsumsi ikan.

4.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya produksi perikanan
3. Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
4. Meningkatnya angka konsumsi ikan

BAB.V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Sasaran Strategi pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam keterkaitannya dengan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho ALLAH SWT 2026, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah menetapkan Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik
2. Peningkatan Produksi Perikanan;
3. Peningkatan Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
4. Peningkatan Angka Konsumsi Ikan

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam mendukung kebijakan Daerah dalam lima Tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap;
3. Meningkatkan produksi perikanan budidaya;
4. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K;
5. Meningkatkan Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan;
6. Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
7. Meningkatkan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan pada Renstra Tahun 2021 – 2026 tersaji pada tabel berikut :

Sebelum Reviu

Tabel 5.1a. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan produksi perikanan,	Meningkatnya produksi perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	1. Meningkatkan produksi perikanan
Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, Meningkatkan jumlah pelaku usaha perikanan, Meningkatkan angka konsumsi ikan.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	1. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan sesuai dengan RZWP3K	2. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K
		3. Peningkatan rehabilitasi dan konservasi habitat vital di pesisir dan laut	3. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir
		4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	4. Meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)
			5. Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan
	Meningkatnya pelaku usaha perikanan	Peningkatan Rumah Tangga Perikanan	6. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung
			7. Meningkatkan kualitas SDM dan teknologi produksi hasil perikanan
	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan Produksi Perikanan	8. Meningkatkan produksi perikanan tangkap
			9. Meningkatkan produksi perikanan budidaya
		Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil	10. Penerapan cara pengolahan ikan yang baik

		perikanan	11. Penerapan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
			12. Sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan

Setelah Reviu

Tabel 5.1b. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan produksi perikanan,	Meningkatnya produksi perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	Meningkatkan produksi perikanan
Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, Meningkatkan angka konsumsi ikan.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Peningkatan Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K
		Peningkatan rehabilitasi dan konservasi habitat vital di pesisir dan laut	Meningkatkan Kawasan Konservasi yang Dikelolas secara Berkelanjutan
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan
	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	Meningkatkan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan

3.1.1. Pengembangan Sentra Perikanan

Sentra Perikanan merupakan upaya percepatan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur Jambi terpilih.

Pengembangan Sentra Perikanan bertujuan untuk (i) meningkatkan produksi perikanan, produktivitas usaha dan meningkatkan kualitas produk kelautan dan perikanan, (ii)

meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang adil dan merata, serta (iii) mengembangkan kawasan sentra perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat. Adapun sasaran pengembangan sentra perikanan adalah sebagai berikut (i) ekonomi rumah tangga masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil makin kuat, (ii) usaha kelautan dan perikanan kelas menengah ke atas makin bertambah dan berdaya saing tinggi, serta (iii) sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi Daerah dan nasional.

Pendekatan pengembangan Sentra Perikanan melalui :

1. Ekonomi Kelautan dan Perikanan Berbasis Wilayah

Mendorong penerapan manajemen hamparan untuk mencapai skala ekonomi mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya, sekaligus mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan sarana produksi, proses produksi, pengolahan dan pemasaran hasil dan pengelolaan lingkungan dalam suatu sistem yang mapan.

2. Kawasan Ekonomi Unggulan

Memacu pengembangan komoditas yang memiliki kriteria (i) bernilai ekonomis tinggi, (ii) teknologi tersedia, (iii) permintaan pasar besar, dan (iv) dapat dikembangkan secara massal.

3. Sentra Produksi

Sentra Perikanan berada dalam kawasan pemasok hasil perikanan (sentra produksi perikanan) yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya dan telah menerapkan teknologi inovatif dengan kawasan dan mutu terjamin.

4. Unit Usaha

Seluruh unit usaha dilakukan dengan menggunakan prinsip bisnis secara profesional dan berkembang dalam suatu kemitraan usaha yang saling memperkuat dan menghidupi.

5. Penyuluhan

Penguatan kelembagaan dan pengembangan jumlah penyuluh merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan pengembangan sentra perikanan. Penyuluh akan berperan sebagai fasilitator dan pendamping penerapan teknologi penangkapan dan budidaya ikan serta pengolahan hasil perikanan.

6. Lintas Sektor

Sentra Perikanan dikembangkan dengan dukungan dan kerjasama berbagai instansi terkait untuk mendukung kepastian usaha antara lain terkait dengan sarana dan prasarana pemasaran produk perikanan, tata ruang wilayah, penyediaan air bersih, listrik, akses jalan, dan BBM.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengembangkan Sentra Perikanan antara lain:

1. Pembangunan sarana dan prasarana perikanan seperti (i) pengembangan pelabuhan perikanan dengan prioritas di Kuala Tungkal dan Nipah Panjang, (ii) pengembangan kapal dan alat penangkapan ikan sebesar 5.100 unit, (iii) pengembangan kawasan budidaya, (iv) memenuhi seluruh kebutuhan benih ikan, (v) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (seperti; pengembangan sistem rantai dingin (cold chain system), sentra pengolahan, sentra industri hasil perikanan dan pasar ikan) di 11 Kab/Kota;
2. Pengembangan ekspor melalui pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berpotensi ekspor;
3. Mendorong peningkatan nilai investasi perikanan
4. Perluasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan;

5. Pengembangan lembaga pembiayaan kelautan dan perikanan yang mampu menyalurkan dana pembiayaan melalui program KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank)
6. Pembangunan prasarana pulau-pulau kecil
7. Peningkatan kapasitas skala usaha dan kewirausahaan meliputi: (i) usaha perikanan tangkap, (ii) usaha perikanan budidaya (iii) usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

5.1.2. *Entrepreneurship*

Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha (entrepreneurship) dilaksanakan melalui upaya membangun kepercayaan (trust building) bagi para pelaku, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan. Jiwa entrepreneurship para pelaku tersebut dibangun agar para pelaku dapat memanfaatkan fasilitas guna memperlancar pengelolaan usaha, baik yang diperoleh melalui kredit maupun melalui program-program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Strategi entrepreneurship akan memenuhi kebutuhan nelayan dan pembudidaya serta pemasar dan pengolah dalam memproduksi seperti kapal, BBM, jaring, benih, pengairan dan lain-lainnya, serta pemerintah mengupayakan kepastian pasar bagi penjualan produk perikanan dengan harga yang pantas. Pengembangan kewirausahaan dilakukan dalam rangka penciptaan usaha di sektor kelautan dan perikanan bagi sarjana yang masih menganggur. Kegiatan yang dilakukan adalah pembekalan dan motivasi dilanjutkan dengan pelatihan/magang mengenai budidaya perikanan, penangkapan, pengolahan dan pemasaran serta pembuatan proposal. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat memperoleh bantuan permodalan baik dari lembaga keuangan, BUMN, Swasta maupun dari pemerintah melalui dana APBN.

5.1.3. Networking

Setiap individu dan setiap wilayah punya potensi masing-masing yang sangat besar di samping juga masing-masing memiliki kekurangan atau kelemahan. Namun demikian setiap pelaku pembangunan kelautan dan perikanan bekerja sendiri-sendiri. Sampai saat ini masih ada pemangku kepentingan pembangunan kelautan dan perikanan yang belum terhimpun dalam suatu bentuk jaringan kerja bahkan masih terlihat indikasi bahwa masing-masing masih mengutamakan identitas diri. Keadaan tersebut akan berpengaruh pada hasil kerja yang kurang optimal dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan akan mengoptimalkan hasil pembangunan kelautan dan perikanan dengan memfasilitasi pengembangan jejaring kerja. Melalui penciptaan dan penguatan networking, baik secara internal Provinsi-Kabupaten/Kota, antar instansi/lintas sektor, komunitas bisnis, kerjasama internasional (ekspor). Melalui pembentukan jejaring kerja akan terbina interaksi yang baik, secara langsung dan tidak langsung, antara berbagai pemangku kepentingan dan instansi pemerintah, sehingga terjalin suatu kesatuan yang lebih besar dan kuat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengeliminir kekurangan dan kelemahan yang dimiliki.

5.1.4. Teknologi dan Inovasi

Dinas Kelautan dan Perikanan akan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan hanya jika dapat menguasai teknologi perikanan budidaya, penangkapan, pengolahan dan pasca panen, serta teknologi kelautan untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya serta adaptasi perubahan iklim. Kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan untuk menemukan teknologi-teknologi baru dalam rangka meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan secara lestari dan bertanggung jawab.

5.1.5. Empowering

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar masyarakat secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat, maka dibutuhkan pemberdayaan masyarakat.

Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberi fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan menuju kemandirian dan kesejahteraan. Secara umum, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kultur, penguatan lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan usaha ekonomi produktif yang berbasis sumberdaya lokal.

Pemberdayaan masyarakat ini dalam jangka panjang diarahkan untuk (i) peningkatan kemandirian masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan masyarakat, (ii) peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan, (iii) pengembangan kemitraan dengan lembaga swasta dan pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan perwujudan komitmen Pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan antara lain pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran ikan, pengawasan sumberdaya ikan, pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini akan dilakukan (i) identifikasi dan kajian seluruh potensi dan permasalahan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada dalam rangka menyusun perencanaan

pengelolaannya berbasis desa (ii) melibatkan secara aktif pemangku kepentingan terkait dengan upaya pemberdayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat, (iii) meningkatkan kapasitas aparatur sebagai pengelola di wilayahnya, (iv) memperbaiki kualitas masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan permasalahan yang dihadapi terkait dengan peningkatan kapasitas usaha, (v) memanfaatkan secara optimal kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang telah dibentuk oleh berbagai program sebelumnya atau membentuk kelompok masyarakat baru, (vi) mengoptimalkan peran tenaga pendamping sebagai fasilitator sekaligus motivator dalam proses perencanaan partisipatif, pelaksanaan dan pelaporan di tingkat desa serta melakukan sosialisasi, serta (vii) menerapkan upaya pemberdayaan secara konsisten dan berkelanjutan dengan pola bottom up sehingga jenis kegiatan yang dilaksanakan merupakan aspirasi kelompok masyarakat di wilayahnya.

5.1.6. Penguatan Kelembagaan kelompok Masyarakat

Keberadaan kelompok masyarakat di bidang budidaya, penangkapan ikan, pengolahan, pemasaran dan kelompok pengawasan akan memberikan keuntungan bagi anggota kelompoknya. Melalui kelompok akan terjadi interaksi antar anggota untuk saling tukar pengalaman dan menumbuhkan kesadaran bersama untuk menguatkan posisi tawar, serta kemudahan dalam pembinaan, penyampaian informasi, dan diseminasi teknologi. Berbagai kelompok tercakup dalam Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan), KUB (Kelompok Usaha Bersama) penangkapan ikan, Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), dan Pokmas (Kelompok Masyarakat) pengelola terumbu karang. Kelompok-kelompok yang sudah terbentuk akan terus diupayakan keberadaannya dan ditingkatkan kapasitasnya, sedangkan kelompok-kelompok baru akan ditumbuhkan. Pembentukan atau penguatan kelompok secara modern dapat memanfaatkan akses ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi peningkatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

BAB.VI. REVIU RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan Provinsi Jambi terutama di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai enam Program dan tiga puluh Kegiatan dan Sembilan puluh sembilan Sub Kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI

1).Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Evaluasi kinerja perangkat daerah

2).Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

3).Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah :

- Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

4).Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan

5). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan logistik kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

6).Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

- Pengadaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan
- Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pengadaan mebel
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya
- Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

7).Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

8).Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

1).Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi :

- Penyusunan dan penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat

- Rehabilitasi wilayah perairan dan pulau-pulau kecil
- Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir

2). Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi :

- Penetapan Rekomendasi Izin Pelaksanaan di Perairan Pesisir
- Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Laut sebagai database Perizinan Berusaha

3). Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil :

- Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
- Penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

1). Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil :

- Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan
- Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap
- Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap

2). Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :

- Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan
- Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap
- Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap

3). Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT :

- Penetapan persyaratan dan prosedur izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT

- Penyediaan data dan informasi usaha perikanan tangkap untuk kapal Penangkap Ikan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 Mil

5). Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi :

- Penentuan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan
- Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
- Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan perikanan

6). Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT :

- Penetapan persyaratan dan prosedur persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- Penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dengan ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT

7). Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :

- Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT
- Penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT

8). Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT :

- Penetapan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- Penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran si Atas 10 GT sampai dengan 30 GT

4. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

1). Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :

- Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan
- Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan
- Penyediaan data dan informasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan

2). Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing :

- Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan
- Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan

3). Kegiatan Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing :

- Penetapan persyaratan dan prosedur izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT
- Penerbitan rekomendasi izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT

4). Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:

- Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) di laut dan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) di laut dan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

5). Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut :

- Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kabupaten/kota

- Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- Pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di laut dan lintas daerah kabupaten/kota
- Pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

6). Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat :

- Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di air payau dan air tawar lintas daerah kabupaten/kota
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1). Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil :

- Pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 Mil
- Pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil
- Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil
- Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
- Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penangkakan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
- Pengawasan Usaha Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Kewenangan Provinsi

2). Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :

- Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya
- Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan provinsi
- Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penangkutan ikan di wilayah Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
- Pengawasan usaha pembudidayaan ikan di wilayah Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi

6. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

1). Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :

- Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan perizinan berusaha pemasaran ikan, pengolahan ikan, dan surat izin usaha jasa pasca panen penangkapan ikan skala menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri
- Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha subsector pengolahan ikan dan subsector pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar

2). Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar :

- Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing

- Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar

3). Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :

- Pemetaan dan pemantauan bahan baku utama pengolahan/distribusi ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Pemberian insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Untuk lebih rincinya Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
03.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2	2	21.659.692.091	2	27.229.898.253	3	29.552.138.078	3	31.875.101.886	4	34.428.862.074	4	37.190.498.281	4	182.112.141.036		
		Persentase Tindak Lanjut atas Evaluasi Kinerja	78	83		85		88		90		95		98		98			
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan		2 Laporan	368.004.716	2 Laporan	815.000.000	2 Laporan	905.000.000	2 Laporan	995.000.000	2 Laporan	1.085.000.000	2 Laporan	1.175.000.000	2 Laporan	5.343.004.716		
3.25.01.1.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	202.314.240	2 Dokumen	220.000.000	2 Dokumen	240.000.000	2 Dokumen	260.000.000	2 Dokumen	280.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	1.502.314.240		
3.25.01.1.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	33.122.720	2 Dokumen	45.000.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	65.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	85.000.000	2 Dokumen	358.122.720		
3.25.01.1.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10 Laporan	132.567.756	10 Laporan	150.000.000	10 Laporan	170.000.000	10 Laporan	190.000.000	10 Laporan	210.000.000	10 Laporan	230.000.000	10 Laporan	1.082.567.756		
3.25.01.1.01.07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	440.000.000	1 Laporan	480.000.000	1 Laporan	520.000.000	1 Laporan	560.000.000	1 Laporan	2.400.000.000		

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelola administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan		12 Bulan	18.682.257.475	12 Bulan	20.552.398.253	12 Bulan	22.604.638.078	12 Bulan	24.862.601.886	12 Bulan	27.326.362.074	12 Bulan	29.997.998.281	12 Bulan	144.026.256.046		
3.25.01.1.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1 Tahun	18.247.634.775	152 Orang/Bulan	20.072.398.253	154 Orang/Bulan	22.079.638.078	156 Orang/Bulan	24.287.601.886	158 Orang/Bulan	26.716.362.074	160 Orang/Bulan	29.387.998.281	160 Orang/Bulan	140.791.633.346		
3.25.01.1.02.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		22 Orang	434.622.700	1 Dokumen	480.000.000	1 Dokumen	525.000.000	1 Dokumen	575.000.000	1 Dokumen	610.000.000	1 Dokumen	610.000.000	1 Dokumen	3.234.622.700		
3.25.01.1.03	Admnsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen BMD OPD		2 Dokumen	188.030.600	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	1.188.030.600		
3.25.01.1.03.01	- Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	38.607.500	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	288.607.500		
3.25.01.1.03.06	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	149.423.100	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	899.423.100		
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya disiplin ASN Dinas Kelautan dan Perikanan		12 Bulan	154.519.956	12 Bulan	500.000.000	12 Bulan	520.000.000	12 Bulan	540.000.000	12 Bulan	560.000.000	12 Bulan	560.000.000	12 Bulan	2.834.519.956		
3.25.01.1.05.02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				325 Paket	250.000.000	325 Paket	250.000.000	325 Paket	250.000.000	325 Paket	250.000.000	325 Paket	250.000.000	1625 Paket	1.250.000.000		
3.25.01.1.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1 Tahun	42.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	100 Orang	542.000.000		
3.25.01.1.05.10	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		1 Kali	112.519.956	200 Orang	150.000.000	200 Orang	170.000.000	200 Orang	190.000.000	200 Orang	210.000.000	200 Orang	210.000.000	200 Orang	1.042.519.956		
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan		12 Bulan	577.768.740	12 Bulan	1.042.500.000	12 Bulan	1.047.500.000	12 Bulan	1.047.500.000	12 Bulan	1.047.500.000	12 Bulan	1.047.500.000	12 Bulan	5.986.219.114		

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

3.25.01.1.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3 Jenis	7.270.000	3 Paket	10.000.000	3 Paket	15.000.000	3 Paket	15.000.000	3 Paket	15.000.000	3 Paket	15.000.000	15 Paket	77.270.000		
3.25.01.1.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	300.000.000	5 Paket	300.000.000	5 Paket	300.000.000	5 Paket	300.000.000	5 Paket	300.000.000	25 Paket	1.675.950.374		
3.25.01.1.06.03	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	5 Paket	250.000.000		
3.25.01.1.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Tahun	24.995.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	10 Paket	274.995.000		
3.25.01.1.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		7 Jenis	62.992.500	2 Paket	75.000.000	2 Paket	75.000.000	2 Paket	75.000.000	2 Paket	75.000.000	2 Paket	75.000.000	10 Paket	437.992.500		
3.25.01.1.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1 Tahun	1.998.500	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	39.498.500		
3.25.01.1.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Tahun	399.998.800	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	2.399.998.800		
3.25.01.1.06.10	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Laporan	80.513.940	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	830.513.940		
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan		12 Bulan	353.491.094	12 Bulan	2.765.000.000	12 Bulan	2.940.000.000	12 Bulan	2.915.000.000	12 Bulan	2.915.000.000	12 Bulan	2.915.000.000	12 Bulan	14.803.491.094		
3.25.01.1.07.01	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				11 Unit	865.000.000	11 Unit	865.000.000	11 Unit	865.000.000	11 Unit	865.000.000	11 Unit	865.000.000	44 Unit	4.325.000.000		

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

3.25.01.1.07.02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan				1 Unit	700.000.000	1 Unit	700.000.000	1 Unit	700.000.000	1 Unit	700.000.000	1 Unit	700.000.000	4 Unit	3.500.000.000		
3.25.01.1.07.05	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5 Jenis	48.894.112	5 Paket	200.000.000	5 Paket	175.000.000	5 Paket	150.000.000	5 Paket	150.000.000	5 Paket	150.000.000	25 Paket	873.894.112		
3.25.01.1.07.06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Jenis	133.367.588	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	50 Unit	1.133.367.588		
3.25.01.1.07.09	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0		1 Unit	500.000.000	1 Unit	700.000.000	1 Unit	700.000.000	1 Unit	700.000.000	1 Unit	700.000.000	5 Unit	3.300.000.000		
3.25.01.1.07.10	- Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		8 Jenis	171.229.394	10 Unit	300.000.000	10 Unit	300.000.000	10 Unit	300.000.000	10 Unit	300.000.000	10 Unit	300.000.000	50 Unit	1.671.229.394		
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan		12 Bulan	642.590.000	12 Bulan	655.000.000	12 Bulan	655.000.000	12 Bulan	655.000.000	12 Bulan	655.000.000	12 Bulan	655.000.000	12 Bulan	3.917.590.000		
3.25.01.1.08.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Tahun	3.996.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	28.996.000		
3.25.01.1.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Jenis	638.594.000	4 Laporan	650.000.000	4 Laporan	650.000.000	4 Laporan	650.000.000	4 Laporan	650.000.000	4 Laporan	650.000.000	4 Laporan	3.888.594.000		
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan		12 Bulan	847.549.466	12 Bulan	1.200.000.000	12 Bulan	1.200.000.000	12 Bulan	1.200.000.000	12 Bulan	1.200.000.000	12 Bulan	1.200.000.000	12 Bulan	6.847.549.466		
3.25.01.1.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		59 Unit	470.337.120	59 Unit	500.000.000	59 Unit	500.000.000	59 Unit	500.000.000	59 Unit	500.000.000	59 Unit	500.000.000	59 Unit	2.970.337.120		

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

3.25.01.1.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit	59.753.280	4 Unit	100.000.000	4 Unit	100.000.000	4 Unit	100.000.000	4 Unit	100.000.000	4 Unit	100.000.000	4 Unit	559.753.280		
3.25.01.1.09.09	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		- 1 Tahun	297.464.566	3 Unit	500.000.000	3 Unit	500.000.000	3 Unit	500.000.000	3 Unit	500.000.000	3 Unit	500.000.000	15 Unit	2.797.464.566		
3.25.01.1.09.10	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Jenis	19.994.500	20 Unit	100.000.000	20 Unit	100.000.000	20 Unit	100.000.000	20 Unit	100.000.000	20 Unit	100.000.000	20 Unit	519.994.500		
03.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Usulan PKKPRL Berupa Fasilitas Pemanfaatan Ruang Laut Untuk Masyarakat Lokal/Tradisional			994.518.604		2.484.500.000		3.220.000.000	2 Rekomendasi	3.560.000.000	2 Rekomendasi	5.170.000.000	2 Rekomendasi	5.145.000.000	6 Rekomendasi	18.429.500.000		
		Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan				1 Kawasan		1 Kawasan		1 Kawasan		1 Kawasan		1 Kawasan		5 Kawasan			
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah sosialisasi Perda/Permen/Peraturan Gubernur		1 Kegiatan	694.400.984	1 Kegiatan	2.140.000.000	1 Kegiatan	2.975.000.000	1 Kegiatan	3.440.000.000	1 Kegiatan	4.675.000.000	1 Kegiatan	4.950.000.000	5 Kegiatan	17.030.000.000		
3.25.02.1.01.01	- Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Mustan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP3K				1 Dokumen	430.000.000	1 Dokumen	405.000.000	1 Dokumen	405.000.000	1 Dokumen	1.385.000.000	1 Dokumen	1.385.000.000	1 Dokumen	4.010.000.000		
3.25.02.1.01.02	- Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		129.750 ekor	694.400.984	2.135,91 Ha	760.000.000	3.560,45 Ha	920.000.000	5.713,04 Ha	1.050.000.000	11.213,36 Ha	1.170.000.000	16.520,68 Ha	1.290.000.000	39.143,44 Ha	5.190.000.000		

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

3.25.02.1.01.03	- Rehabilitasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi				267,1 Ha	950.000.000	352,4 Ha	1.090.000.000	554,5 Ha	1.225.000.000	627,2 Ha	1.360.000.000	896,2 Ha	1.495.000.000	2.697,4 Ha	6.120.000.000		
3.25.02.1.01.04	- Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						60 Orang	210.000.000	60 Orang	360.000.000	60 Orang	360.000.000	60 Orang	360.000.000	240 Orang	1.290.000.000		
3.25.02.1.01.06	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP						1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	420.000.000	1 Dokumen	420.000.000		
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terbitnya perizinan yang sesuai dengan RZWP3K		2 Dokumen	300.117.620	2 Dokumen	344.500.000	2 Dokumen	245.000.000	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	495.000.000	2 Dokumen	195.000.000	10 Dokumen	1.399.500.000		
3.25.02.1.02.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi		1 Dokumen	148.733.468	2 Rekomendasi	124.500.000									1 Dokumen	124.500.000		
3.25.02.1.02.02	Penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				2 Rekomendasi	100.000.000	2 Rekomendasi	50.000.000	2 Rekomendasi	50.000.000	2 Rekomendasi	50.000.000	2 Rekomendasi	50.000.000	10 Rekomendasi	300.000.000		

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

3.25.02.1.02.03	- Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan		1 Kali	151.384.152	2 Rekomendasi	40.000.000	2 Rekomendasi	115.000.000	2 Rekomendasi	40.000.000	2 Rekomendasi	115.000.000	2 Rekomendasi	115.000.000	10 Rekomendasi	425.000.000		
3.25.02.1.02.04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan										1Rekomendasi	300.000.000			1 Dokumen	300.000.000		
3.25.02.1.02.05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut				2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	250.000.000		
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pesisir		2 Kelompok	144.798.192	4 Kelompok	80.000.000	4 Kelompok	250.000.000	4 Kelompok	430.000.000	4 Kelompok	330.000.000	4 Kelompok	590.000.000	20 Kelompok	1.680.000.000		
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya						60 Orang	70.000.000	60 Orang	70.000.000	60 Orang	70.000.000	60 Orang	70.000.000	240 Orang	280.000.000		
3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						2 Kelompok	50.000.000	8 Kelompok	250.000.000	2 Kelompok	50.000.000	8 Kelompok	250.000.000	20 Kelompok	600.000.000		
3.25.02.1.03.03	Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	80 Orang	120.000.000		

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

3.25.02.1.03.04	- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		2 Kali	144.798.192	3 Kelompok	80.000.000	3 Kelompok	100.000.000	3 Kelompok	80.000.000	3 Kelompok	180.000.000	3 Kelompok	240.000.000	15 Kelompok	680.000.000		
03.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	53.833,0 Ton	53.833,0 Ton	716.277.769	54.480,9 Ton	13.417.920.000	54.807,8 Ton	9.321.740.000	55.136,7 Ton	7.836.810.000	55.467,5 Ton	8.393.820.000	55.800,3 Ton	14.070.000.000	55.800,3 Ton	53.040.290.000		
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Meningkatnya produksi perikanan tangkap di laut		100%	55.351.428	48.003,2 Ton	3.130.000.000	48.905,1 Ton	3.370.000.000	50.320,0 Ton	3.625.000.000	49.755,0 Ton	3.965.000.000	51.194,5 Ton	4.400.000.000	51.194,5 Ton	18.490.000.000		
3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		1 Tahun	55.351.428	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	240.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000		
3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1500 Unit	2.850.000.000	2000 Unit	3.060.000.000	100 Unit	3.285.000.000	100 Unit	3.595.000.000	120 Unit	4.000.000.000	120 Unit	16.790.000.000		
3.25.03.1.01.03	Penyediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				15 Unit	120.000.000	15 Unit	130.000.000	15 Unit	140.000.000	15 Unit	150.000.000	15 Unit	160.000.000	75 Unit	700.000.000		
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya produksi perikanan tangkap di PUD			0	6.477,7 Ton	1.617.920.000	5.902,7 Ton	1.476.740.000	4.816,7 Ton	1.616.810.000	5.712,5 Ton	1.763.820.000	6.775,0 Ton	1.900.000.000	6.775,0 Ton	8.375.290.000		

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

3.25.03.1.02.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				1 Dokumen	717.920.000	1 Dokumen	451.740.000	1 Dokumen	466.810.000	1 Dokumen	488.820.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	2.625.290.000		
3.25.03.1.02.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				250 Unit	780.000.000	300 Unit	895.000.000	350 Unit	1.010.000.000	400 Unit	1.125.000.000	450 Unit	1.240.000.000	1750 Unit	5.050.000.000		
3.25.03.1.02.03	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				5 Unit	120.000.000	5 Unit	130.000.000	5 Unit	140.000.000	5 Unit	150.000.000	5 Unit	160.000.000	25 Unit	700.000.000		
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Meningkatnya izin kapal perikanan tangkap berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT	15 Izin	56.207.480	30 Izin	500.000.000	32 Izin	510.000.000	12 Izin	520.000.000	14 Izin	530.000.000	18 Izin	545.000.000	106 Izin	2.605.000.000			
3.25.03.1.03.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tagkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	340.000.000	1 Dokumen	345.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	355.000.000	1 Dokumen	360.000.000	5 Dokumen	1.750.000.000		
3.25.03.1.03.02	- Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	20 Dokumen	56.207.480	30 Rekomendasi	140.000.000	32 Rekomendasi	145.000.000	12 Rekomendasi	150.000.000	14 Rekomendasi	155.000.000	18 Rekomendasi	160.000.000	106 Rekomendasi	750.000.000			
3.25.03.1.03.03	- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	105.000.000		

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

3.25.03.1.04	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Meningkatnya izin kapal perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil		10 Izin	26.853.671	15 Izin	315.000.000	17 Izin	320.000.000	19 Izin	325.000.000	20 Izin	330.000.000	22 Izin	355.000.000	93 Izin	1.645.000.000		
3.25.03.1.04.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi		1 Dokumen	26.853.671	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	900.000.000		
3.25.03.1.04.02	- Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				15 Rekomendasi	140.000.000	17 Rekomendasi	145.000.000	19 Rekomendasi	150.000.000	20 Rekomendasi	155.000.000	22 Rekomendasi	155.000.000	93 Rekomendasi	745.000.000		
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			0	10 Kapal	175.000.000	15 Kapal	180.000.000	20 Kapal	185.000.000	25 Kapal	190.000.000	30 Kapal	205.000.000	100 Kapal	935.000.000		
3.25.03.1.05.01	- Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	4 Dokumen	560.000.000		
3.25.03.1.05.02	- Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan				10 Dokumen	65.000.000	15 Dokumen	70.000.000	20 Dokumen	75.000.000	25 Dokumen	80.000.000	30 Dokumen	85.000.000	100 Dokumen	375.000.000		

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan perikanan		1 Tahun	487.563.659	3.860 Kapal	7.160.000.000	4.020 Kapal	3.010.000.000	4.180 Kapal	1.100.000.000	4.340 Kapal	1.140.000.000	4.440 Kapal	5.575.000.000	20.840 Kapal	17.985.000.000		
3.25.03.1.06.01	- Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan						1 Pelabuhan Perikanan	150.000.000							1 Dokumen	150.000.000		
3.25.03.1.06.02	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				2 Unit	6.125.000.000	2 Unit	1.970.000.000	1 Unit	175.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	4.550.000.000	7 Unit	12.970.000.000		
3.25.03.1.06.03	- Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		1 Tahun	487.563.659	2 Layanan	1.035.000.000	2 Layanan	890.000.000	2 Layanan	925.000.000	2 Layanan	990.000.000	2 Layanan	1.025.000.000	2 Layanan	4.865.000.000		
3.25.03.1.07	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tersedianya izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		1 Dokumen	67.583.948	2 Kapal	195.000.000	2 Kapal	195.000.000	2 Kapal	195.000.000	2 Kapal	195.000.000	2 Kapal	770.000.000	10 Kapal	1.550.000.000		
3.25.03.1.07.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi		1 Dokumen	11.397.326	1 Dokumen	135.000.000	1 Dokumen	135.000.000	1 Dokumen	135.000.000	1 Dokumen	135.000.000	1 Dokumen	150.000.000	5 Dokumen	690.000.000		
3.25.03.1.07.02	- Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan		1 Kegiatan	56.186.622	2 Rekomendasi	60.000.000	2 Rekomendasi	60.000.000	2 Rekomendasi	60.000.000	2 Rekomendasi	60.000.000	2 Rekomendasi	620.000.000	10 Rekomendasi	860.000.000		

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

3.25.03.1.08	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya izin kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		100%	11.434.427	5 Kapal	185.000.000	5 Kapal	185.000.000	5 Kapal	185.000.000	5 Kapal	185.000.000	5 Kapal	200.000.000	25 Kapal	940.000.000		
3.25.03.1.08.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi		1 Dokumen	11.434.427	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	120.000.000	5 Dokumen	620.000.000		
3.25.03.1.08.02	- Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi				5 Rekomendasi	60.000.000	5 Rekomendasi	60.000.000	5 Rekomendasi	60.000.000	5 Rekomendasi	60.000.000	5 Rekomendasi	80.000.000	25 Rekomendasi	320.000.000		
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		100%	11.283.156	10 Kapal	140.000.000	15 Kapal	75.000.000	20 Kapal	85.000.000	25 Kapal	95.000.000	30 Kapal	120.000.000	100 Kapal	515.000.000		
3.25.03.1.09.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi		1 Dokumen	11.283.156	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	265.000.000		
3.25.03.1.09.02	- Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				10 Rekomendasi	30.000.000	15 Rekomendasi	40.000.000	20 Rekomendasi	50.000.000	25 Rekomendasi	60.000.000	30 Rekomendasi	70.000.000	100 Rekomendasi	250.000.000		

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	52.067,0 Ton	27,1 Ton/Ha/ Tahun	1.704.223.552	57.168,0 Ton	7.303.000.000	58.997,0 Ton	7.863.500.000	60.885,0 Ton	9.388.000.000	62.833,0 Ton	10.851.600.000	64.843,6 Ton	12.253.000.000	64.843,6 Ton	35.827.722.720		
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya izin usaha pembudidayaan ikan		100%	79.962.313	20 Izin	60.000.000	25 Izin	77.000.000	30 Izin	94.000.000	35 Izin	111.000.000	40 Izin	128.000.000	40 Izin	470.000.000		
3.25.04.1.01.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	25.000.000	1 Rekomendasi	30.000.000	1 Rekomendasi	35.000.000	1 Rekomendasi	40.000.000	1 Rekomendasi	45.000.000	5 Rekomendasi	175.000.000		
3.25.04.1.01.02	- Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		1 Kali	66.551.313	1 Rekomendasi	15.000.000	1 Rekomendasi	20.000.000	1 Rekomendasi	25.000.000	1 Rekomendasi	30.000.000	1 Rekomendasi	35.000.000	5 Rekomendasi	125.000.000		
3.25.04.1.01.03	- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Sakala Usaha dan Tingkat Risiko		1 Tahun	13.411.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	27.000.000	1 Dokumen	34.000.000	1 Dokumen	41.000.000	1 Dokumen	48.000.000	5 Dokumen	170.000.000		
3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Meningkatnya izin usaha pembudidayaan ikan di laut			0	1 Izin	40.000.000	2 Izin	50.000.000	3 Izin	60.000.000	4 Izin	70.000.000	5 Izin	80.000.000	5 Izin	300.000.000		

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

3.25.04.1.02.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	25.000.000	1 Rekomendasi	30.000.000	1 Rekomendasi	35.000.000	1 Rekomendasi	40.000.000	1 Rekomendasi	45.000.000	5 Rekomendasi	175.000.000		
3.25.04.1.02.02	- Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	15.000.000	1 Rekomendasi	20.000.000	1 Rekomendasi	25.000.000	1 Rekomendasi	30.000.000	1 Rekomendasi	35.000.000	5 Rekomendasi	125.000.000		
3.25.04.1.03	Penerbitan Izin Kapal pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasi, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Tersedianya izin kapal pengangkut pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT	0		2 Izin		310.000.000	2 Izin	395.000.000	2 Izin	480.000.000	2 Izin	565.000.000	2 Izin	600.000.000	10 Izin	2.350.000.000		
3.25.04.1.03.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	110.000.000	1 Rekomendasi	145.000.000	1 Rekomendasi	180.000.000	1 Rekomendasi	215.000.000	1 Rekomendasi	250.000.000	5 Rekomendasi	900.000.000		
3.25.04.1.03.02	- Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	200.000.000	1 Rekomendasi	250.000.000	1 Rekomendasi	300.000.000	1 Rekomendasi	350.000.000	1 Rekomendasi	350.000.000	5 Rekomendasi	1.450.000.000		
3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Jumlah pembudidaya ikan kecil yang memiliki Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di laut dan lintas Kabupaten/Kota	0		5 Kelompok		250.000.000	6 Kelompok	320.000.000	7 Kelompok	390.000.000	8 Kelompok	460.000.000	9 Kelompok	530.000.000	37 Kelompok	1.950.000.000		

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

3.25.04.1.04.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Rekomendasi	100.000.000	1 Rekomendas i	120.000.000	1 Rekomendas i	140.000.000	1 Rekomendas i	160.000.000	1 Rekomendasi	180.000.000	5 Rekomendasi	700.000.000		
3.25.04.1.04.02	- Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Rekomendasi	150.000.000	1 Rekomendas i	200.000.000	1 Rekomendas i	250.000.000	1 Rekomendas i	300.000.000	1 Rekomendasi	350.000.000	5 Rekomendasi	1.250.000.000		
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatnya pengelolaan pembudidayaan ikan	100%	1.624.261.239	9 Jenis	6.643.000.000	9 Jenis	7.021.500.000	7 Jenis	1.280.000.000	7 Jenis	1.540.000.000	7 Jenis	1.515.000.000	7 Jenis	6.168.122.720			
3.25.04.1.05.01	-Penyediaan data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	250.000.000		
3.25.04.1.05.02	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				4 Unit	160.000.000	4 Unit	160.000.000	4 Unit	160.000.000	4 Unit	160.000.000	4 Unit	160.000.000	20 Unit	800.000.000		

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

3.25.04.1.05.03	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota		1 Paket	1.062.938.840	100 Unit	5.030.000.000	100 Unit	5.320.000.000										
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				4 Unit	100.000.000	4 Unit	100.000.000	4 Unit	100.000.000	4 Unit	100.000.000	1 Paket	100.000.000	20 Unit	500.000.000		
3.25.04.1.05.05	- Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota		4 Jenis	272.199.595	6 Unit	553.000.000	6 Unit	561.500.000										
3.25.04.1.05.06	- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat		50 Sampel	256.000.084	2 Dokumen	445.000.000	2 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	615.000.000	2 Dokumen	850.000.000	2 Dokumen	900.000.000	10 Dokumen	3.310.000.000		

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

3.25.04.1.05.07	- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya				60 Orang	70.000.000	60 Orang	75.000.000	60 Orang	80.000.000	60 Orang	85.000.000	60 Orang	90.000.000	300 Orang	400.000.000		
3.25.04.1.05.08	- Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi				4 Ha	110.000.000	4 Ha	110.000.000	4 Ha	110.000.000	4 Ha	110.000.000	4 Ha	110.000.000	20 Ha	550.000.000		
3.25.04.1.05.09	- Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	100 Orang	500.000.000		
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Meningkatnya pengelolaan pembudidayaan ikan			0		0		0	2 Jenis	7.084.000.000	2 Jenis	8.105.600.000	2 Jenis	9.400.000.000	2 Jenis	24.589.600.000		
3.25.04.1.06.01	Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota								8 Unit	700.000.000	9 Unit	800.000.000	10 Unit	900.000.000	27 Unit	2.400.000.000		
3.25.04.1.06.01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota								100 Unit	6.384.000.000	100 Unit	7.305.600.000	100 Unit	8.500.000.000	300 Unit	22.189.600.000		

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

03.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	FREKUENSI PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4 Kali	4 Kali	644.400.866	4 Kali	2.437.000.000	4 Kali	1.263.000.000	4 Kali	1.327.000.000	4 Kali	1.409.000.000	4 Kali	1.562.600.000	4 Kali	10.472.200.003		
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase pelaku usaha perikanan yang terawasi		100%	466.115.490	62%	1.976.000.000	64%	756.000.000	66%	776.000.000	68%	816.000.000	70%	841.000.000	70%	6.692.000.000		
3.25.05.1.01.01	- Pengawasan Pemanfaatan Ruang laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil		3 Kali	44.338.000	3 Dokumen	130.000.000	3 Dokumen	130.000.000	3 Dokumen	130.000.000	3 Dokumen	130.000.000	4 Dokumen	0	16 Dokumen	660.000.000		
3.25.05.1.01.02	- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		3 Kali	421.777.490	2 Dokumen	1.810.000.000	2 Dokumen	590.000.000	2 Dokumen	610.000.000					6 Dokumen	4.325.000.000		
3.25.05.1.01.03	- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				2 Dokumen	36.000.000	2 Dokumen	36.000.000	2 Dokumen	36.000.000					6 Dokumen	180.000.000		
3.25.05.1.01.04	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi										2 Pelaku Usaha	36.000.000	2 Pelaku Usaha	36.000.000	4 Pelaku usaha	72.000.000		
3.25.05.1.01.05	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi										2 Pelaku Usaha	650.000.000	2 Pelaku Usaha	665.000.000	5 Pelaku usaha	1.315.000.000		

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

	Pengawasan Usaha Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Kewenangannya Provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi										3 Pelaku Usaha	0	3 Pelaku Usaha	140.000.000	6 Pelaku usaha	140.000.000		
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya persentase pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum daratan		100%	178.285.376	72%	461.000.000	74%	507.000.000	80%	551.000.000	82%	593.000.000	84%	721.600.000	84%	3.780.200.003		
3.25.05.1.02.01	- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya		11 Kab/Kota	117.889.376	3 Dokumen	288.000.000	3 Dokumen	310.000.000	3 Dokumen	331.000.000					9 Dokumen	1.739.200.000		
3.25.05.1.02.02	- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya		11 Kab/Kota	60.396.000	3 Dokumen	99.000.000	3 Dokumen	112.000.000	3 Dokumen	125.000.000					9 Dokumen	619.000.000		

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

3.25.05.1.02.03	- Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				1 Dokumen	74.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	95.000.000	2 Pelaku Usaha	105.000.000	2 Pelaku Usaha	115.000.000	4 Pelaku usaha	474.000.000		
3.25.05.1.02.04	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi										3 Pelaku Usaha	350.000.000	3 Pelaku Usaha	461.600.000	6 Pelaku usaha	474.000.001		
3.25.05.1.02.05	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi										3 Pelaku Usaha	138.000.000	3 Pelaku Usaha	145.000.000	6 Pelaku usaha	474.000.002		
03.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	26,231 Ton	26,231 Ton	1.756.186.177	28,148 Ton	5.759.100.000	28.992,44 Ton	4.649.800.000	29.862,21 Ton	5.061.500.000	30.758,07 Ton	5.477.800.000	31.680,81 Ton	5.592.052.580	31.680,81 Ton	26.540.252.580		
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbitnya jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan		100%	1.137.834.535	4 izin	2.391.000.000	4 izin	2.609.000.000	4 izin	2.848.000.000	4 izin	3.091.600.000	4 izin	3.264.200.000	20 izin	14.203.800.000		

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

3.25.06.1.01.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi			1.137.834.535	3 Rekomendasi	461.000.000	3 Rekomendasi	516.000.000	3 Rekomendasi	580.000.000	3 Rekomendasi	641.000.000	3 Rekomendasi	641.000.000	15 Rekomendasi	2.839.000.000		
3.25.06.1.01.02	- Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				3 Rekomendasi	350.000.000	3 Rekomendasi	360.000.000	3 Rekomendasi	375.000.000	3 Rekomendasi	385.000.000	3 Rekomendasi	385.000.000	15 Rekomendasi	1.855.000.000		
3.25.06.1.01.03	- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				3 Dokumen	1.580.000.000	3 Dokumen	1.733.000.000	3 Dokumen	1.893.000.000	3 Dokumen	2.065.600.000	3 Dokumen	2.238.200.000	3 Dokumen	9.509.800.000		
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UPI yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan		2 Kelompok	618.351.642	3 Kelompok	2.533.100.000	5 Kelompok	1.155.800.000	7 Kelompok	1.278.500.000	9 Kelompok	1.401.200.000	12 Kelompok	1.342.852.580	12 Kelompok	7.711.452.580		
3.25.06.1.02.01	- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko			618.351.642	13 Unit Usaha	791.200.000	13 Unit Usaha	886.200.000	13 Unit Usaha	981.200.000	13 Unit Usaha	1.076.200.000	13 Unit Usaha	1.076.200.000	65 Unit Usaha	4.811.000.000		

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

3.25.06.1.02.02	- Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				13 Unit Usaha	1.741.900.000	13 Unit Usaha	269.600.000	13 Unit Usaha	297.300.000	13 Unit Usaha	325.000.000	13 Unit Usaha	266.652.580	65 Unit Usaha	2.900.452.580		
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan			0	1 Dokumen	835.000.000	1 Dokumen	885.000.000	1 Dokumen	935.000.000	1 Dokumen	985.000.000	1 Dokumen	985.000.000	1 Dokumen	4.625.000.000		
3.25.06.1.03.01	- Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Utama Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	325.000.000		
3.25.06.1.03.02	- Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas				10 Unit Usaha	470.000.000	10 Unit Usaha	485.000.000	10 Unit Usaha	500.000.000	10 Unit Usaha	515.000.000	10 Unit Usaha	515.000.000	50 Unit Usaha	2.485.000.000		
3.25.06.1.03.3	- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir				1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	335.000.000	1 Dokumen	370.000.000	1 Dokumen	405.000.000	1 Dokumen	405.000.000	1 Dokumen	1.815.000.000		
JUMLAH TOTAL					27.475.299.059		58.631.418.253		55.870.178.078		59.048.411.886		65.731.082.074		75.813.150.861		326.422.106.339		

BAB. VII.

REVIU KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, pembangunan harus dilakukan dengan arah untuk mengembangkan semua sektor yang menjadi potensi unggulan daerah. Sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan salah satu potensi unggulan Provinsi Jambi yang layak dikembangkan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Diantara misi RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah

Adapun tujuan dari Misi Pertama **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas”** adalah untuk Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Terkait dengan misi ini maka tujuan yang ditetapkan Dinas Perikanan adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik. Pencapaian Tujuan ini ditandai dengan Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Prediket Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan dari Misi Kedua **“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”** adalah Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan misi ini maka tujuan yang ditetapkan untuk Pembangunan dan Kelautan adalah :

- 1) Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya dan Tangkap Optimal dengan indikator kinerja, yaitu :
 - 1) Jumlah produksi perikanan (ton)

- 2) Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dengan Indikator Kinerja, yaitu :
 - 1) Jumlah Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (ha)
 - 2) Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan
- 3) Meningkatkan angka konsumsi ikan dengan Indikator Kinerja, yaitu :
 - 1) Nilai Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)

Dari penjabaran di atas maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- 2) Prediket Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)
- 3) Jumlah produksi perikanan (ton)
- 4) Jumlah Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Ha)
- 5) Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (%)
- 6) Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)

Berdasarkan Uraian di atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat Dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 7.1. Reviu Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Data Capaian Awal tahun Perencanaan	Target Renstra Tahun ke-					OPD yang Bertanggung Jawab
								1	2	3	4	5	
Terwujudnya JAMBI Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho ALLAH SWT	Memantapkan Tatakelola Pemerintahan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	78,65	79,85	80,35	81,75	82,00	
						2. Predikat Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	68,37 (B)	75 (BB)	80 (A)	85 (A)	90 (AA)	95 (AA)	
	Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah	Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan	Meningkatkan produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3. Jumlah produksi perikanan (ton)	110.833,00	111.648,9	113.804,8	116.021,7	118.300,5	120.643,9	
					Meningkatnya Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	4. Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	10.687,49	10.687,49	16.400,53	11.213,36	5.833,19	5.696,36	
						5. Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	50%	60%	65%	70%	75%	77%	
			Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Meningkatkan angka konsumsi ikan	Meningkatnya angka konsumsi ikan	6. Nilai Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah (kg/kapita/tahun)	39,40	40,60	41,00	41,50	42,00	42,50	

BAB. VIII. PENUTUP

Penyusunan Reviu Renstra Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman dan acuan kerja segenap aparatur di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi baik yang bekerja di lingkup kantor utama dan UPTD di daerah serta petugas teknis yang bekerja di lapangan.

Semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Reviu Renstra Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat terwujud apabila semua jajaran aparatur di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang meliputi Kepala Dinas, Sekretaris, para kepala bidang dan staf, kepala UPTD, Kepala instalasi, para Pejabat Fungsional Tertentu dan tenaga teknis pendamping di lapangan harus memiliki pemahaman/persepsi yang sama terhadap setiap Program/Kegiatan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah dengan disiplin, kerja keras serta belajar dalam meningkatkan penguasaan IPTEK di bidang kelautan dan perikanan serta memberikan pelayanan/pembinaan prima kepada pelaku usaha perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah produk perikanan dengan komitmen bersama.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari sinergi dan kerjasama antara pihak terkait baik secara kelembagaan vertikal, kerjasama dan sinergi dengan pemerintah Kabupaten dan Kota juga kerjasama dan sinergi dengan pemerintah pusat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan serta BAPPENAS, maupun pihak Komisi II DPRD.

Sinergi dan kerjasama Horizontal adalah bekerja sama dan bermitra dengan kelembagaan Dinas lintas sektor seperti Dinas PU, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Balai POM, Bappeda, Biro SDA.

Penyusunan Reviu Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan acuan dan indikator kinerja sebagai bahan Evaluasi pimpinan untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas.

Harapan kami agar Reviu Renstra Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi JAMBI 2021-2026, ditindak lanjuti oleh semua aparatur di jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dengan rincian rencana aksi harian, mingguan, bulanan dan tahunan sehingga menjadi acuan kerja yang terukur dan dipertanggung jawabkan kepada pimpinan.

Jambi, 06 Juni 2023

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi**



TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Madya
NIP.19681021 199903 1 002